



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN SEMARANG SELATAN**

**SEMARANG
HEBAT!**

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (P – RENSTRA)

**KECAMATAN SEMARANG SELATAN
KOTA SEMARANG
TAHUN 2016 2021**

KECAMATAN SEMARANG SELATAN
Jl. Taman Sompok Telp/Fax (024)8449641 Semarang 50249

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Landasan hukum yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah kita yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 telah diganti dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014. Undang-Undang yang baru ini harus dilaksanakan paling lambat dua tahun setelah diundangkan. Pemerintah Kota Semarang telah melakukan penataan ulang semua perangkat daerahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ini. Ada perangkat daerah harus dihapus/digabung karena tugas dan fungsinya berubah. namun ada pula perangkat daerah yang baru.

Perubahan-perubahan tersebut mengakibatkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah juga harus direview agar selaras dengan perundangan yang baru.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini otomatis juga harus merubah Rencana Strategis masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. Demikian halnya dengan Kecamatan karena beberapa perubahan tugas pokok dan fungsinya yang harus diimplementasikan kedalam Rencana Strategisnya.

Dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan Undang-undang tersebut, perubahan yang mendasar adalah urusan yang ditangani kecamatan terkait pelaksanaan kewenangan pemerintahan umum. Kewenangan ini diaplikasikan menjadi urusan kewilayahan. Camat dalam menyelenggarakan tugas urusan pemerintahan umum di wilayah kerjanya bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 225 ayat 1 point a.

Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 9 ayat (5)) meliputi:

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila,

pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;
- d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila
- g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Urusan lain yang menjadi kewenangan kecamatan adalah pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik

Pemerintah Kecamatan Semarang Selatan wajib menyusun Revisi Renstra Tahun 2016-2021, agar selaras dengan Review RPJMD Kota Semarang sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Revisi Renstra tersebut meliputi penyesuaian tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunannya yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman kepada Review RPJMD Kota Semarang 2016-2021

1.2. Landasan Hukum

Renstra Perubahan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 disusun atas dasar:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 470);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18) ;
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 61);
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83); Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Semarang Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 98);
21. Peraturan Daerah Kota Semarang No.14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);

22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
23. Peraturan Walikota Semarang No. 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2016-2021 ini adalah sebagai berikut:

1. Maksud

Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dan pemangku kepentingan baik dilingkungan pemerintahan, masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan di wilayah Kecamatan Semarang Selatan secara sinergis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang tahun 2016-2021 adalah :

- 1 Sebagai alat untuk menerjemahkan dan menyelaraskan antara visi, misi dan janji politik Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 dengan tujuan, sasaran dan program prioritas dalam Renstra Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2016 – 2021;
- 2 Sebagai pedoman pada masing-masing Seksi Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Kecamatan Semarang Selatan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan setiap tahunnya sehingga menjadi terintegrasi, terpadu, terarah dan terukur serta berorientasi pada pencapaian hasil serta

dampak yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Semarang;

- 3 Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan serta Rencana Program Kerja Tahunan (RPTK) Kelurahan di lingkungan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang;
- 4 Sebagai dasar pengukuran kinerja tahunan dan lima tahunan terhadap Kecamatan selaku Organisasi Perangkat Daerah Kota Semarang serta pada masing-masing Pejabat Struktural di lingkungan Kecamatan Semarang Selatan terkait indikator kinerja eselon;
- 5 Sebagai acuan bagi masyarakat dan *stakeholder* terkait untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kewilayahan di lingkungan Kecamatan Semarang Selatan serta pengawasan atas kinerja Pemerintah Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang Perubahan Renstra Kecamatan Semarang Selatan
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUBAHAN PELAYANAN KECAMATAN SEMARANG SELATAN

- 2.1 Tugas ,Fungsi dan struktur organisasi
 - 2.1.1 Tugas Kecamatan Semarang Selatan
 - 2.1.2 Fungsi Kecamatan Semarang Selatan
 - 2.1.3 Struktur/ Bagan Organisasi Kecamatan Semarang Selatan
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Semarang Selatan
 - 2.2.1 Sumber daya manusia
 - 2.2.2 Sumber daya alam (kewilayahan)
 - 2.2.3 Sarana dan prasarana
- 2.3 Hasil Kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Selatan

2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Semarang Selatan

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi permasalahan berdasar tugas dan fungsi OPD

3.2 Telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih

3.3 Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan arah kebijakan jangka menengah

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

6.1 Penyelesaian permasalahan di kecamatan dengan program dan kegiatan

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Kinerja Kecamatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII : PENUTUP

merupakan harapan-harapan terhadap kondisi dan rencana pencapaian kinerja periode 2016-2021

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUBAHAN PELAYANAN KECAMATAN SEMARANG SELATAN

2.1 Tugas Perangkat Daerah Kecamatan Semarang Selatan

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan berfungsi sebagai koordinator kegiatan kewilayahan dalam memberikan pelayanan secara efektif dan efisien dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan dengan Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang. Kecamatan sebagai Perangkat Daerah diharapkan mampu mengantisipasi, mengakomodasi serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dan berkembang dalam masyarakat, sehingga diharapkan dapat terwujud aparatur pemerintah kecamatan yang handal dan profesional.

Selain dari pada itu perubahan

2.2 Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Semarang Selatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 sebagai Unsur Perangkat Daerah sekaligus penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik, Kecamatan Semarang Selatan mempunyai kedudukan sebagai berikut :

- a. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
- b. Kecamatan merupakan pembantu Walikota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

- c. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- d. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan

Camat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- b. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Kesejahteraan sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- c. penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- e. penyelenggaraan kerjasama;
- f. penyelenggaraan sekretariat;
- g. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
- h. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- i. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- j. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Walikota yang didelegasikan kepada Camat;

- k. penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- l. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Kecamatan;
- m. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.3 Bagan Perangkat Daerah Kecamatan Semarang Selatan

Sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang nomor 54 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Semarang yang merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang tentang Perangkat Daerah dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang, maka maka formasi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Semarang Selatan terdiri dari :

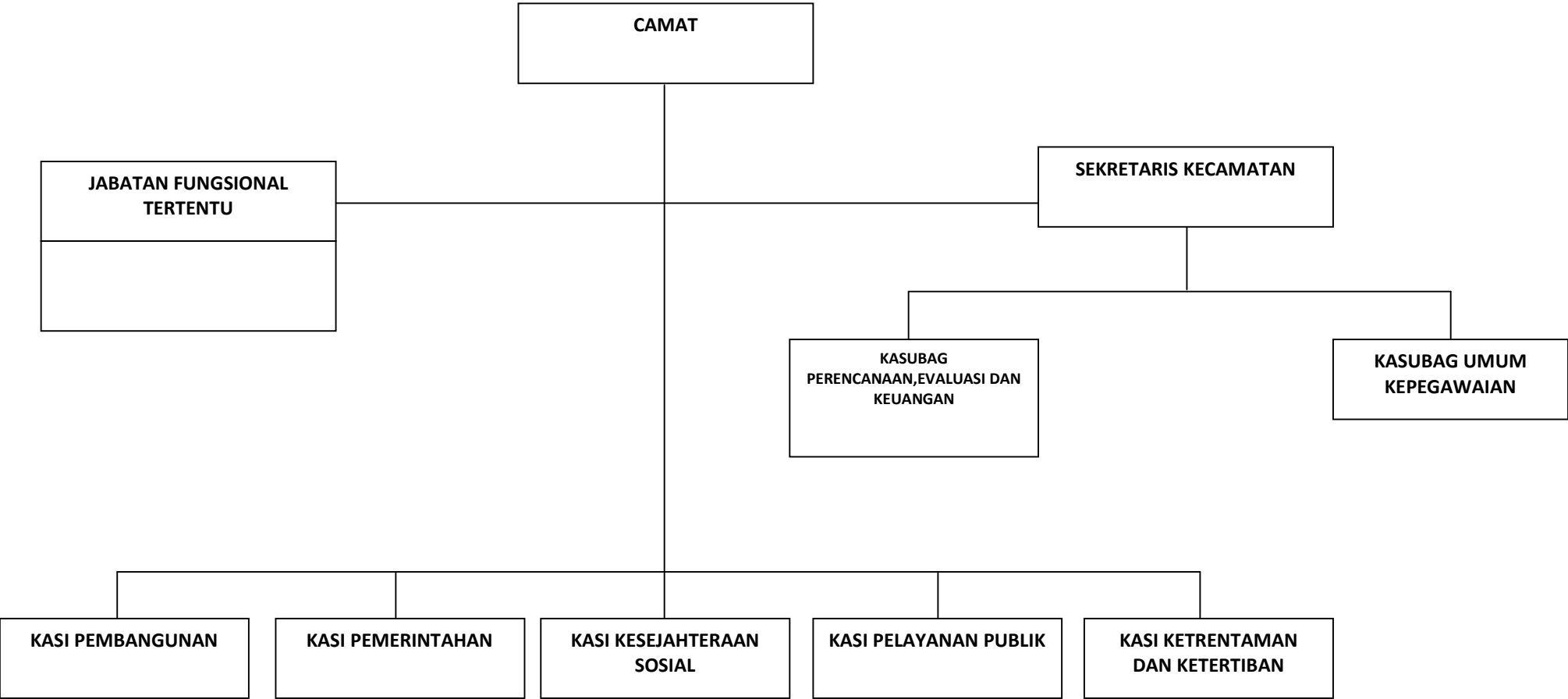
- 1. Camat
- 2. Sekretaris Camat; membawahi 2 Sub Bagian meliputi :
 - Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3. Kepala Seksi Kecamatan antara lain :
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan
 - b. Kepala Seksi Pembangunan
 - c. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
 - d. Kepala Seksi Pelayanan Publik
 - e. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 4. Jabatan Fungsional

Adapun formasi Perangkat Daerah Kelurahan di Kecamatan Semarang Selatan sebagai berikut :

- 1. Lurah
- 2. Sekretaris Lurah
- 3. Kepala Seksi yang meliputi :
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pembangunan
 - b. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
 - c. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - d. Kepala Seksi Kependudukan

bagian Perangkat Daerah kecamatan adalah sebagaimana halaman berikut :

Gambar 2.1
Bagan Organisasi Kecamatan Semarang Selatan



Adapun tugas dari masing-masing unsur tersebut, yaitu :

1. Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

2. Sekretaris Camat

Sekretaris Camat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik dan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

3. Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan

Kepala Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- h. menyiapkan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kinerja Tahunan;
- i. menyiapkan kegiatan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan;
- j. menyiapkan kegiatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan;
- k. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota;

- l. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - m. menyiapkan kegiatan laporan pertanggungjawaban dan Rencana Kerja Tingkat Kelurahan;
 - n. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Kecamatan;
 - o. menyiapkan pengelolaan gaji dan tunjangan ASN di lingkungan Kecamatan;
 - p. menyiapkan kegiatan penatausahaan barang pakai habis dan barang milik daerah;
 - q. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Kecamatan;
 - r. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
 - s. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
 - t. menyiapkan penilaian kinerja bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
 - u. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
 - v. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
 - w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan;
 - c. Membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
 - d. Memeriksa hasil kerja bawahan;
 - e. Menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
 - f. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
 - g. Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian;

- h. Menyiapkan kegiatan tatakelola persuratan, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Kecamatan;
- i. Menyiapkan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kecamatan;
- j. Menyiapkan kegiatan Penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di Kecamatan;
- k. Menyiapkan kegiatan Pengadaan Perlengkapan gedung kantor, barang inventaris, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
- l. Menyiapkan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
- m. Menyiapkan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi Kecamatan;
- n. Menyiapkan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Kecamatan;
- o. Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- p. Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- q. Menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- r. Menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- s. Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan kegiatan bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pemerintahan;
- b. Membagi tugas kepada bawahan;
- c. Membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. Menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;

- f. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pemerintahan;
- h. Menyiapkan kegiatan pembinaan dibidang pemerintahan umum, sosial politik dan keagrariaan;
- i. Menyiapkan kegiatan administrasi, dan fasilitasi di bidang keagrariaan;
- j. Menyiapkan kegiatan penyusunan data pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan, pemberian ganti rugi, pembebasan tanah;
- k. Menyiapkan kegiatan monitoring dan inventarisasi setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah negara tumbuh di wilayah kerjanya;
- l. Menyiapkan kegiatan penyusunan data monografi Kecamatan baik statis maupun dinamis;
- m. Menyiapkan kegiatan penyusunan profil kecamatan, dan fasilitasi penyusunan profil kelurahan;
- n. Menyiapkan kegiatan fasilitasi pencapaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), retribusi, dan pajak daerah lainnya;
- o. Menyiapkan kegiatan pembinaan dan fasilitasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), RT, RW, di wilayah kerjanya;
- p. Menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemilu di wilayah kerjanya;
- q. Menyiapkan kegiatan pembinaan administrasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- r. Menyiapkan kegiatan lomba administrasi kelurahan, dan lomba pemberdayaan masyarakat;
- s. Menyiapkan kegiatan fasilitasi pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan wilayah kelurahan, perubahan batas wilayah kelurahan serta perubahan nama ibukota kelurahan atas dasar data dan peraturan yang berlaku;
- t. Menyiapkan kegiatan pemberian rekomendasi tertentu di bidang pemerintahan;

- u. Menyiapkan kegiatan fasilitasi kegiatan UPTD/B bidang pemerintahan dalam wilayah kerjanya;
 - v. Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pemerintahan;
 - w. Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pemerintahan;
 - x. Menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
 - y. Menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan;
 - z. Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan;
 - aa. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
6. Kepala Seksi Pembangunan
- Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas:
- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran seksi Pembangunan;
 - b. membagi tugas kepada bawahan;
 - c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan;
 - e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
 - f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
 - g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pembangunan;
 - h. menyiapkan kegiatan musrenbang kecamatan;
 - i. menyiapkan kegiatan fasilitasi pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik;
 - j. menyiapkan kegiatan fasilitasi peningkatan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat;
 - k. menyiapkan kegiatan pembinaan dan fasilitasi Badan Keswadayaan Masyarakat;
 - l. pemantauan dan evaluasi di bidang Kelembagaan dan partisipasi Masyarakat;
 - m. menyiapkan kegiatan fasilitasi penunjang keberhasilan program produksi pertanian;

- n. menyiapkan kegiatan fasilitasi dan pengolahan data perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;
 - o. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemugaran perumahan dan permukiman penduduk;
 - p. menyiapkan kegiatan penyusunan dan pelaporan data potensi prasarana dan sarana umum (tempat ibadah, jalan / jembatan, sekolah, lapangan olahraga, WC umum, terminal dll);
 - q. menyiapkan kegiatan fasilitas pemeliharaan dan pelayanan kebersihan serta keindahan lingkungan;
 - r. menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengarahan penanaman turus jalan dan penghijauan;
 - s. menyiapkan kegiatan fasilitasi pameran pembangunan;
 - t. menyiapkan kegiatan penyusunan rekomendasi tertentu di bidang pembangunan;
 - u. menyiapkan kegiatan fasilitasi kegiatan UPTD/B bidang pembangunan di wilayah kerjanya;
 - v. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pembangunan;
 - w. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pembangunan;
 - x. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
 - y. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan;
 - z. Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan;
 - aa. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
7. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
- Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:
- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - b. membagi tugas kepada bawahan;
 - c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;

- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Kesejahteraan Sosial;
- h. menyiapkan kegiatan fasilitasi pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- i. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberdayaan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial (PSDKS);
- j. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan;
- k. menyiapkan kegiatan fasilitasi program kesehatan masyarakat;
- l. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan penanganan warga miskin;
- m. menyiapkan kegiatan fasilitasi program pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- n. menyiapkan kegiatan fasilitasi program jaminan sosial;
- o. menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengembangan perekonomian kelurahan dengan memberikan penyuluhan tentang dana bantuan ekonomi lemah, dana usaha ekonomi, kelompok pembangunan kelurahan dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K);
- p. Data pemberdayaan masyarakat (data swadaya masyarakat, BKM);
- q. menyiapkan kegiatan fasilitasi PKK, program peningkatan pengarusutamaan gender, UMKM, dan Karang Taruna;
- r. menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
- s. menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan organisasi kemasyarakatan dan Lembaga nirlabala lainnya;
- t. menyiapkan kegiatan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- u. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian bantuan kepada badan sosial dan korban bencana alam;

- v. menyiapkan kegiatan administrasi Badan Amil Zakat (BAZ) dan PMI;
 - w. menyiapkan kegiatan penyuluhan program wajib belajar;
 - x. menyiapkan kegiatan fasilitasi pameran dan festival seni budaya;
 - y. menyiapkan kegiatan penyusunan rekomendasi tertentu di bidang kesejahteraan sosial
 - z. menyiapkan kegiatan fasilitasi dan koordinasi kegiatan UPTD/B bidang kesejahteraan sosial dalam wilayah kerjanya;
 - aa. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - bb. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - cc. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
 - dd. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - ee. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - ii. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
8. Kepala Seksi Pelayanan Publik
- Kepala Seksi Pelayanan Publik mempunyai tugas:
- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pelayanan Publik;
 - b. membagi tugas kepada bawahan;
 - c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan;
 - e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
 - f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
 - g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pelayanan Publik;
 - h. menyiapkan bahan pembinaan petugas pelayanan;
 - i. menyiapkan kegiatan penyusunan tatalaksana pengelolaan pengaduan dan pemberian informasi;

- j. menyiapkan kegiatan pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;
- k. menyiapkan kegiatan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi layanan publik;
- l. menyiapkan kegiatan pengamanan perangkat lunak layanan publik;
- m. menyiapkan kegiatan pemberian layanan rekomendasi / surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan, kependudukan, pembangunan, trantib, lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial;
- n. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pelayanan Publik;
- o. menyiapkan kegiatan pelayanan data dan informasi di Kecamatan;
- p. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pelayanan Publik;
- q. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- r. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Publik;
- s. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Publik;
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

9. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

- h. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelesaian perselisihan warga masyarakat;
- j. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengawalan pejabat/orang-orang penting;
- k. menyiapkan kegiatan fasilitasi penjagaan tempat-tempat penting dan kegiatan penting;
- l. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengumpulan bahan keterangan dan informasi indikasi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- m. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota.
- n. menyiapkan kegiatan fasilitasi sosialisasi kebijakan Pemerintah terkait Ketentraman dan ketertiban umum;
- o. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyusunan data dan informasi potensi Satlinmas;
- p. menyiapkan kegiatan fasilitasi penerbitan dan pencabutan Kartu Tanda Anggota Satlinmas;
- q. menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemetaan kebutuhan fasilitas, prasarana dan sarana penunjang tugas operasional Satlinmas;
- r. menyiapkan kegiatan fasilitasi mobilisasi anggota Satlinmas untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, penanggulangan bencana, penanganan ketenteraman dan ketertiban serta pengamanan pemilu;
- s. menyiapkan kegiatan fasilitasi seleksi anggota Satlinmas;
- t. menyiapkan kegiatan fasilitasi Siskamling Kelurahan;
- u. menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemberian Piagam Penghargaan kepada anggota Satlinmas;
- v. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian santunan kepada anggota Satlinmas apabila terjadi kecelakaan tugas;
- w. menyiapkan kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban umum;

- x. menyiapkan kegiatan pengadaan, pelaksanaan pengaturan pemasangan bendera dan umbul-umbul;
- u. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- v. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- w. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- x. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- y. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- z. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

10. Kelompok Jabatan Fungsional

Bertugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan masing-masing.

11. Lurah

Lurah mempunyai tugas membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan sosial, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Kecamatan Semarang Selatan

2.2.1 Sumber Daya manusia

Jumlah pegawai di lingkungan Kecamatan Semarang Selatan sebanyak 89 orang ASN orang perincian sebagai berikut :

Jumlah pegawai di lingkungan Kecamatan Semarang Selatan sebanyak 89 orang ASN orang perincian sebagai berikut :

1. Menurut Jenis Kelamin

- Laki-laki : 55 orang
- Perempuan : 34 orang

Tabel 2.1
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Lokasi Kerja
Per Oktober 2017

No	LOKASI KERJA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Kecamatan	20	7	27
2	Bulustalan	4	2	6
3	Barusari	3	2	5
4	Randusari	3	2	5
5	Mugassari	1	6	7
6	Pleburan	7	2	9
7	Wonodri	4	3	7
8	Peterongan	3	2	5
9	Lamper Lor	3	3	6
10	Lamper Kidul	4	2	6
11	Lamper Tengah	3	3	6

Sumberdata : DUK Kec.Semarang Selatan per Oktober 2017

2. Data Pegawai Menurut Menurut tingkat Pendidikan

- Pasca Sarjana (S2) : 4 orang
- Sarjana (S1) : 39 orang
- Sarjana Muda (D3) : 6 orang
- SLTA : 31 orang
- SLTP : 6 orang
- SD : 3 orang

Adapun sebaran tingkat pendidikan pegawai berdasarkan lokasi kerja adalah sebagaimana tabel berikut

Tabel 2.2
Data Pegawai Tingkat Pendidikan Berdasarkan Lokasi Kerja
Per Oktober 2017

No	KELURAHAN	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	JML
1	Kecamatan	3	9	-	7	6	2	27
2	Bulustalan	-	4	-	2	-	-	6

3	Barusari	-	3	-	2	-	-	5
4	Randusari	-	1	1	3	-	-	5
5	Mugassari	1	1	2	3	-	-	7
6	Pleburan	-	4	1	4	-	-	9
7	Wonodri	-	4	2	1	-	-	7
8	Peterongan	-	4	-	1	-	-	5
9	Lamper Lor	-	4	-	2	-	-	6
10	Lamper Kidul	-	3	-	2	-	1	6
11	Lamper Tengah	-	2	-	4	-	-	6

Sumberdata : DUK Kec.Semarang Selatan per Oktober 2017

3. Menurut Tingkat Pendidikan Ketrampilan Komputansi

- Basic /Dasar : 0 orang
- Lanjut : 0 orang
- SMK IT : 0 orang
- D3 IT : 0 orang
- S1 IT : 0 orang

Tabel 2.3
Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Ketrampilan Komputansi Per Oktober 2017

No	KELURAHAN	Basic	Lanjut	D3 IT	SMK IT	D3 IT	SI IT	JUMLAH
1	Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
2	Bulustalan	-	-	-	-	-	-	-
3	Barusari	-	-	-	-	-	-	-
4	Randusari	-	-	-	-	-	-	-
5	Mugassari	-	-	-	-	-	-	-
6	Pleburan	-	-	-	-	-	-	-
7	Wonodri	-	-	-	-	-	-	-
8	Peterongan	-	-	-	-	-	-	-

9	Lamper Lor	-	-	-	-	-	-	-
10	Lamper Kidul	-	-	-	-	-	-	-
11	Lamper Tengah	-	-	-	-	-	-	-

Sumberdata : DUK Kec.Semarang Selatan per Oktober 2017

4. Menurut Golongan
- Golongan IV : 4 orang
 - Golongan III : 56 orang
 - Golongan II : 25 orang
 - Golongan I : 4 orang

Tabel 2.4
Data Pegawai Berdasarkan Golongan Kerja
Per oktober 2017

No	KELURAHAN	IV	III	II	I	JUMLAH
1	Kecamatan	2	7	14	2	27
2	Bulustalan	-	4	2	-	6
3	Barusari	-	4	-	1	5
4	Randusari	-	4	1	-	5
5	Mugassari	-	5	2	-	7
6	Pleburan	-	7	2	-	9
7	Wonodri	-	5	2	-	7
8	Peterongan	-	5	-	-	5
9	Lamper Lor	-	5	1	-	6
10	Lamper Kidul	-	5	-	1	6
11	Lamper Tengah	-	5	1	-	6

Sumberdata : DUK Kec.Semarang Selatan per Oktober 2017

5. Menurut Eselon Jabatan, 54 orang terdiri dari
- Eselon III a : 1 orang
 - Eselon III b : 1 orang
 - Eselon IV a : 15 orang
 - Eselon IV b : 50 orang

Adapun penempatan lokasi kerja para pejabat eselon tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Data Eselonisasi Pegawai Berdasarkan Lokasi Kerja
Per Oktober 2017

No	LOKASI KERJA	IIIa	IIIb	IVa	IVb	JUMLAH
1	Kecamatan	1	1	5	2	9
2	Bulustalan	-	-	1	3	4
3	Barusari	-	-	1	3	4
4	Randusari	-	-	1	3	4
5	Mugassari	-	-	1	4	5
6	Pleburan	-	-	1	5	6
7	Wonodri	-	-	1	4	5
8	Peterongan	-	-	1	4	5
9	Lamper Lor	-	-	1	4	5
10	Lamper Kidul	-	-	1	4	5
11	Lamper Tengah	-	-	1	4	5

Sumberdata : DUK Kec.Semarang Selatan per Oktober 2017

Sedangkan jumlah perangkat yang memenuhi jabatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Data Jabatan Berdasarkan Lokasi Kerja
Per Oktober 2017

KELURAHAN	LURAH	SEKLUR	KASI PEMERINTAHAN dan PEMBANGUNAN	KASI KESOS	KASI TRANTIB
Bulustalan	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada
Barusari	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Ada
Randusari	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada
Mugassari	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Pleburan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Wonodri	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Peterongan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Lamper Lor	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Lamper Kidul	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Lamper Tengah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Kecamatan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumberdata : DUK Kec.Semarang Selatan per Oktober 2017

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas di Kecamatan Semarang Selatan didukung dengan peralatan dan perlengkapan berupa :

Gedung Kantor, Rumah Dinas dan Gedung Pertemuan:

- 1. Kantor Camat : 1 unit
- 2. Kantor Lurah : 10 unit
- 3. Rumah Dinas Camat : 1 unit
- 4. Rumah Dinas Lurah : 9 unit
- 5. Gedung Pertemuan : 10 unit

Adapun sebaran Gedung Kantor, Rumah Dinas dan Gedung Pertemuan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
Data Gedung Kantor, Rumah Dinas dan Gedung Pertemuan
Berdasarkan lokasi kerja
Per oktober 2017

No	Lokasi	Gedung Kantor	Rumah Dinas	Gedung Pertemuan
1	Kecamatan	1	1	1
2	Bulustalan	1	1	1
3	Barusari	1	1	1
4	Randusari	1	-	1
5	Mugassari	1	1	1
6	Pleburan	1	1	1
7	Wonodri	1	1	1
8	Peterongan	1	1	1

9	Lamper Lor	1	1	1
10	Lamper Kidul	1	1	1
11	Lamper Tengah	1	1	1

Sumberdata : KIB Kec.Semarang Selatan per Oktober 2017

Guna mendukung mobilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kecamatan Semarang Selatan memiliki :

1. Kendaraan Dinas roda 4 : 3 buah
2. Kendaraan operasional roda 2 : 23 buah
3. Kendaraan operasional roda 3 : 14 buah

Tabel 2.7
Data Kendaraan Operasional Dinas Berdasarkan Lokasi Kerja
Per oktober 2017

No	Lokasi	Roda4	Roda3	Roda2
1	Kecamatan	3	4	3
2	Bulustalan	-	1	2
3	Barusari	-	1	2
4	Randusari	-	-	2
5	Mugassari	-	1	2
6	Pleburan	-	1	2
7	Wonodri	-	1	2
8	Peterongan	-	1	2
9	Lamper Lor	-	1	2
10	Lamper Kidul	-	1	2
11	Lamper Tengah	-	1	2

Sumberdata : KIB Kec.Semarang Selatan per Oktober 2017

2.2.2 Sumber Daya Alam (kewilayahan)

Kecamatan Semarang Selatan ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di

Wilayah Kotamadya Semarang dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah.

Secara topografi Kecamatan Semarang Selatan terletak di dataran rendah namun berbukit-bukit. Sesuai Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kecamatan Semarang Selatan merupakan lokasi perdagangan, perumahan, dan pendidikan, dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Semarang Tengah, dan Kecamatan Semarang Timur
- Sebelah Barat : Kecamatan Semarang Barat
- Sebelah Selatan : Kecamatan Gajahmungkur, Kecamatan Semarang Selatan, Kecamatan Tembalang
- Sebelah Timur : Kecamatan Gayamsari, Kecamatan Pedurungan dan Kecamatan Tembalang

Kecamatan Semarang Selatan dengan luas wilayah sebesar 848,046 Ha, terdiri dari 10 Kelurahan, yaitu Kelurahan Randusari, Kelurahan Bulustalan, Kelurahan Barusari, Kelurahan Mugassari, Kelurahan Pleburan, Kelurahan Wonodri, Kelurahan Peterongan, Kelurahan Lamper Lor, Kelurahan Lamper Kidul, Kelurahan Lamper Tengah terbagi dalam 71 RW (Rukun Warga) dan 498 RT (Rukun Tetangga) dengan jumlah penduduk sebanyak 71.005 Jiwa.

Adapun kondisi demografi adalah sebagaimana daftar berikut (sumber : Laporan Monografi Semester I Tahun 2017)

KEPENDUDUKAN

1.	Jumlah Kepala Keluarga	: 21.763	KK
2.	Penduduk Menurut Jenis Kelamin	: 71.005	Orang
	2.1. Jumlah Laki-laki	: 34.405	Orang
	2.2. Jumlah Perempuan	: 36.529	Orang
3.	Penduduk menurut Kewarganegaraan	:	Orang
	3.1. WNI Laki-laki	: 34.405	Orang
	WNI Perempuan	: 36.529	Orang
	3.2. WNA Laki-laki	: 10	Orang
	WNA Perempuan	: 8	Orang
4.	Penduduk Menurut Agama		
	4.1. Islam	: 56.567	Orang
	4.2. Katholik	: 7.240	Orang
	4.3. Protestan	: 6.075	Orang
	4.4. Hindu	: 380	Orang
	4.5. Budha	: 748	Orang
5.	Penganut Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan Yang maha Esa	: 277	Orang

6	Penduduk Menurut usia				
a.	0 - 4	Tahun	:	7.822	Orang
	5 - 9	Tahun	:	5.435	Orang
	10 - 14	Tahun	:	5.676	Orang
	15 - 19	Tahun	:	5.612	Orang
	20 - 24	Tahun	:	6.150	Orang
	25 - 29	Tahun	:	6.310	Orang
	30 - 34	Tahun	:	6.118	Orang
	35 - 39	Tahun	:	6.310	Orang
	40 - 44	Tahun	:	5.798	Orang
b.	45 - 49	Tahun	:	4.787	Orang
	50 - 54	Tahun	:	4.064	Orang
	55 - 59	Tahun	:	3.263	Orang
	60 - 64	Tahun	:	3.057	Orang
	65	Tahun Keatas	:	2.837	Orang

Tabel 2.8
Luas kelurahan dan jumlah RW/RT per Kelurahan
Se-Kecamatan Semarang Selatan
Tahun 2017

No	KELURAHAN	LUAS (Ha)	JUMLAH		KET
			RW	RT	
1	Bulustalan	274,808	4	31	
2	Barusari	221,540	7	47	
3	Randusari	331,727	7	52	
4	Mugassari	667,696	7	57	
5	Pleburan	190,909	6	50	
6	Wonodri	343,946	13	81	
7	Peterongan	319,762	8	50	
8	Lamper Lor	499,088	5	40	
9	Lamper Kidul	490,718	6	41	
10	Lamper Tengah	228,063	8	12	
	JUMLAH	5.399,085	71	498	

Sumber :Monografi Kecamatan Semarang Selatan semester I tahun 2017

Tabel 2.12
Jumlah Penduduk Per Kelurahan
se-Kecamatan Semarang Selatan
Bulan oktober 2017

NO	KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK			KET
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1	Bulustalan	2.346	2.227	4.573	
2	Barusari	2.221	2.395	4.616	
3	Randusari	1.788	1.798	3.586	
4	Mugassari	3.181	3.281	6.462	
5	Pleburan	2.236	2.334	4.570	
6	Wonodri	2.666	2.648	5.314	
7	Peterongan	1.509	1.578	3.087	
8	Lamper Lor	2.114	2.224	4.338	
9	Lamper Kidul	3.330	3.245	6.575	
10	Lamper Tengah	5.697	5.352	11.049	
	JUMLAH	39.222	39.126	78.348	

Sumber :Monografi kecamatan Semarang Selatan semester I Tahun 2017

Masing-masing kelurahan mempunyai persamaan dan perbedaan karakteristik permasalahan maupun potensinya. Persamaan permasalahan antara lain terkait masalah produksi sampah, masalah kebersihan lingkungan, masalah kesehatan masyarakat, masalah kemiskinan.

Persamaan potensi antara lain dapat ditinjau dari aspek demografi, pemberdayaan kelembagaan masyarakat RT, RW, LPMK, PKK, Karang Taruna, potensi yang dapat dimanfaatkan dari sampah.

Perbedaan karakteristik permasalahan antara lain disebabkan perbedaan topografi, ada wilayah perbukitan seperti

Kelurahan : Randusari, Mugassari, Pleburan dan Wonodri yang menghadapi kendala distribusi air bersih, pengangkutan sampah tentu tidak sama dengan permasalahan wilayah relative datar seperti : Kelurahan Bulustalan, Barusari, Peterongan, Lamper Lor, Lamper Kidul dan Lamper Tengah.

Sedangkan perbedaan potensi dapat ditinjau perekonomian lokal seperti adanya pasar Bulu di Kelurahan Barusari dan Kelurahan Bulustalan, Pasar Randusari di Kelurahan Randusari, Pasar Sendiko di Kelurahan Wonodri, Pasar Peterongan di Kelurahan Peterongan, Pasar Mrican di Kelurahan Lamper Kidul. Pasar Modern seperti ADA Swalayan di Bulustalan, Java Supermall di Kelurahan Lamper Kidul.

Perbedaan potensi wisata, antara lain wisata oleh-oleh khas semarangan di Pandanaran Kelurahan Randusari dan Mugassari. Potensi Wisata religi seperti Khaul Kyai Soleh Darat di kompleks TPU Bergota Kelurahan Randusari, Masjid Pandanaran di Kelurahan Mugassari, Khaul Habib Hasan bin Toha bin Muhammad bin Thoha bin Yahya yang dikenal oleh masyarakat dengan nama Mbah Kramat Jati di Kompleks Masjid Al Hidayah Kelurahan Lamper Kidul.

2.2.3 Sarana dan Prasarana

Guna menunjang kelancaran dalam pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan Semarang Selatan didukung dengan peralatan dan perlengkapan berupa :

Tabel 2.13
Sarana dan Prasarana Kantor
Kecamatan Semarang Selatan tahun 2017

NO	JENIS SARPRAS	KETERANGAN/JUMLAH
1	Telepon Otomatis	2
2	Ruang Merokok	1
3	Radio telekomunikasi	1
4	mesin Tik	3

5	Meja Kerja	40
6	Kursi Kerja	40
7	Kursi Susun	100
8	Lemari/Kardek/Filling Cabinet	23
9	Mesin Hitung	1
10	Alat Ukur	6
11	Alat Pertanian	-
12	Komputer	11
13	Laptop	8
14	Printer	10
15	AC	8
16	Wind Blower	2
17	Exhaust Fan	1
18	Mesin Babat	3
19	Kipas Angin	4
20	Dispenser	3
21	Showcase	1
22	TV	4
23	Sofa	4 set
24	Lemari Kaca JDIH	1
25	Lemari Kaca Souvenir	1
26	Rak Leaflet	2
27	Jam Dinding	6

28	Alat Pengolahan Sampah	1
29	Kamera CCTV	8

Sumber :Simbada Kecamatan Semarang Selatan

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Semarang Selatan

Kinerja pembangunan pada pelayanan masing-masing urusan di Pemerintah Kecamatan Semarang Selatan selama periode 2011 - 2015 dapat dilihat pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.14
Indikator Kinerja Pelayanan di Kecamatan Semarang Selatan
Periode Tahun 2011 – 2015

No	Indikator Kinerja	Target 2015	Kondisi Awal (31 -12- 2011)	Kondisi Akhir (31-12- 2015)	Sumber data
1	2	3	4	5	6
1.	Jumlah TPS yang berada di wilayah Kecamatan	42 TPS	42 TPS	40 TPS	Pengelola Kebersihan
2.	Jumlah TPS yang berada di perbatasan dengan wilayah Kecamatan lain	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Pengelola Kebersihan
3.	Luas wilayah di Kecamatan yang terlayani pengangkutan sampah oleh Pemerintah Kota Semarang	848,046 Ha	848,046 Ha	848,046 Ha	Pengelola Kebersihan
4.	Jumlah Kelurahan yang terlayani pengangkutan sampah oleh Pemerintah Kota Semarang	10 Kel	10 Kel	10 Kel	Pengelola Kebersihan
5.	Volume sampah yang terangkut	23.388 M ³	23.388 M ³	23.388 M ³	Pengelola Kebersihan
6.	Rata-rata frekuensi pengangkutan sampah oleh truk sampah	6 rit/ hari/ truk	6 rit/ hari/ truk	6 rit/ hari/ truk	Pengelola Kebersihan
7.	Jumlah kendaraan pengangkut sampah yang dikelola oleh kecamatan • Truk sampah dump &	8 armada	8 armada	8 armada	Pengelola Kebersihan

	armroll • Sepeda motor roda 3 • Becak smpah	4 armada 93 armada	4 armada 93 armada	4 armada 93 armada	
8.	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	29 KSM	29 KSM	29 KSM	Pengelola Kebersihan
9.	Jenis dan jumlah lapangan olah raga milik umum (bukan milik perseorangan/perusahaan) yang ada di wilayah kecamatan	10 lapangan	10 lapangan	10 lapangan	
10.	Jenis dan jumlah lapangan olah raga yang dibangun oleh Pemerintah Kota Semarang melalui kecamatan	-	a. Jenis: lapangan bulu tangkis & volly	Tidak ada	Seksi Pembangunan
11.	Jenis dan jumlah lapangan olah raga di wilayah kecamatan yang diperbaiki dengan menggunakan anggaran kecamatan	1 lapangan	a. Jenis: Lap.tenis : -	a. Jenis: Lap.tenis : 1	Seksi Pembangunan
12.	Jenis, lokasi dan jumlah kejadian bencana yang terjadi di wilayah kecamatan	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Laporan Kejadian Bencana
13.	Jumlah korban bencana yang terjadi di wilayah kecamatan	-	Tidak ada	Tidak ada	Laporan Kejadian Bencana

14.	Jumlah perkiraan kerugian yang diderita akibat bencana alam (dirinci tiap kejadian bencana)	-	Tidak ada	Tidak ada	Laporan Kejadian Bencana
15.	Jumlah sarana dan prasarana pemerintahan yang dibangun <ul style="list-style-type: none"> • Kantor Kecamatan • Rumah Dinas Camat • Kantor Kelurahan • Rumah Dinas Lurah 		<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada • Tidak ada • Tidak ada • Tidak ada 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada • Tidak ada • Tidak ada • Tidak ada 	Seksi Pembangunan
16.	Jumlah sarana dan prasarana pemerintahan yang diperbaiki <ul style="list-style-type: none"> • Kantor Kecamatan • Rumah Dinas Camat • Kantor Kelurahan • Rumah Dinas Lurah 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 unit • - • - • - 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 unit • - • 4 unit • - 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 unit • - • - • - 	Seksi Pembangunan
17.	Jenis dan jumlah sarana dan prasarana umum yang dibangun oleh Pemerintah Kota Semarang melalui kecamatan	4 sarpras umum	Tidak ada	Tidak ada	Seksi Pembangunan
18.	Jenis dan jumlah sarana dan prasarana umum yang diperbaiki oleh Pemerintah Kota Semarang melalui kecamatan	5 jenis sarpras umum sejumlah 35 buah	Jumlah : 35 bh, dgn jenis klasifikasi sbb : - Pemeliharaan jalan	Jumlah : 35 bh, dgn jenis klasifikasi sbb : - Pemeliharaan jalan	Seksi Pembangunan

			masyarakat : 12 buah - Pemeliharaan saluran air masyarakat : 11 buah - Pemeliharaan saluran air : 3 bh - Pemeliharaan taman :1 bh - Pemeliharaan /rehab balai RT/RW/rumah pintar : 4buah - Pemeliharaan talud: 2 bh - Pemeliharaan sumur umum/ sanitasi : 2 bh	masyarakat : 13 ruas jln - Pemeliharaan saluran air masyarakat : 13 buah - Pemeliharaan saluran air : 3 bh - Pemeliharaan Poskamling : 1 bh - Pemeliharaan /rehab balai RT/RW/rumah pintar : 5 buah	
19	Jumlah pengaduan masyarakat kpd kecamatan atas pelayanan publik	6 Pengaduan	1 Pengaduan	6 Pengaduan	Agenda Pengaduan dan Penanganan
20	Jumlah pengaduan yang dapat ditangani dan diselesaikan kecamatan	3 Pengaduan	1 Pengaduan	3 Pengaduan	Agenda Pengaduan dan




					Penanganan
21	Jumlah pengaduan yang diteruskan kepada unit kerja/SKPD/instansi terkait	3 Pengaduan	Tidak ada	3 Pengaduan	Agenda Pengaduan dan Penanganan
22	Jumlah keluarga yang bertempat tinggal di wilayah kecamatan	16.284 KK	16.284 KK	16.284 KK	Monografi Kecamatan
23	Jumlah keluarga miskin di wilayah kecamatan : KK/Jiwa	3.265/ 11.704	3.265/ 11.704	3.265/ 11.704	Seksi Kessos
24	Jumlah personil Posko Penanggulangan Bencana per hari, personil dari mana saja	5 orang, (seluruh personil dari staf Kec. Semarang Selatan)	-	5 orang, (seluruh personil dari staf Kec. Semarang Selatan)	Laporan Piket PB Kecamatan

Tabel 2.15
Pencapaian Kinerja Keuangan Kecamatan Semarang Selatan
Tahun 2010-2015

URUSAN / PROGRAM	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
LINGKUNGAN HIDUP												
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	232.500.000	223.998.000	226.250.000	225.238.000	203.340.000	198.080.000	203.340.000	201.372.500	248.042.000	245.453.500	310.160.000	301.790.472
program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan lingkungan hidup	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	14.000.000	14.000.000	32.500.000	32.500.000	81.746.000	81.746.000	102.797.000	102.679.000
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN												
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	251.632.000	224.337.860	268.082.000	238.252.146	294.652.000	273.072.423	342.382.000	307.487.248	324.440.000	289.133.113	325.301.000	263.716.959
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	249.609.000	248.128.300	688.413.000	677.162.000	457.191.000	433.297.520	426.610.000	391.531.800	1.450.283.000	1.414.835.620	1.132.340.000	599.172.057
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	24.683.000	24.683.000	40.830.000	40.830.000	57.789.000	44.340.000	61.810.000	53.095.000	61.398.000	61.398.000	84.120.000	74.088.000
Program pembinaan dan peningkatan organisasi perangkat daerah			60.000.000	59.750.000		-						
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah					78.022.000	13.497.750	63.000.000	18.870.000	51.738.000	51.738.000		
Prograpeningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH							64.000.000	63.690.000	20.000.000	20.000.000	75.100.000 127.162.000	57.100.000 114.417.100
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA												
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	31.800.000	3.180.000	30.000.000	30.000.000	38.220.000	36.120.000	540.700.000	52.300.000	1.106.350.000	1.100.400.000	1.300.400.000	1.300.400.000
Program Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan												
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	650.000.000	642.750.000	284.455.000	281.355.000	1.314.769.000	1.229.693.000	1.911.668.000	1.783.372.050	4.275.688.000	4.057.320.000	5.094.854.000	4.807.133.000
PEMUDA DAN OLAH RAGA												
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	61.200.000	60.650.000	100.000.000	99.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0
KESATUAN BANGSA												
program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	26.250.000	26.250.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0
J U M L A H	1.544.674.000	1.470.977.160	1.715.030.000	1.669.487.146	2.457.983.000	2.242.100.693	3.646.010.000	2.904.218.598	7.619.685.000	7.322.024.233	8.552.234.000	7.620.496.588

Tabel 2.16
Pencapaian Kinerja Kecamatan Semarang Selatan
Tahun 2010-2015

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET SPM/IK K	TARGET RENSTRA PD TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Jumlah TPS yang berada di wilayah Kecamatan	8 TPS	2 TPS	2 TPS	3 TPS	6 TPS	8 TPS	2 TPS	2 TPS	2 TPS	7 TPS	8 TPS	100	100	66,7	116	100
2	Jumlah TPS yang berada di perbatasan dengan wilayah Kecamatan lain	4 TPS	2 TPS	2 TPS	2 TPS	3 TPS	4 TPS	1 TPS	1 TPS	2 TPS	3 TPS	3 TPS	50	50	100	100	75
3	Luas wilayah di Kecamatan yang pengangkutan sampah oleh Pemerintah Kota Semarang	23 Km ²	16 Km ²	16 Km ²	16 Km ²	20 Km ²	23 Km ²	16 Km ²	16 Km ²	16 Km ²	20 Km ²	23 Km ²	100	100	100	100	100
4	Jumlah Kelurahan yang terlayani pengangkutan sampah oleh Pemerintah Kota Semarang	16 Kelurahan	2 Kelurahan	2 Kelurahan	2 Kelurahan	16 Kelurahan	16 Kelurahan	2 kelurah an	2 kelurah an	2 kelurah an	16 kelurah an	16 kelurah an	100	100	100	100	100
5	Volume sampah yang terangkut	27 M ³	2M ³	3M ³	16 M ³	24 M ³	27 M ³	3 M ³	3 M ³	16 M ³	24 M ³	27 M ³	150	100	100	100	100
6	Rata-rata frekuensi	1 kali per	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100	150	100	100	100

	pengangkutan sampah oleh truk sampah	hari	per 3 hari	per 3 hari	per 2 hari	per hari	per hari	per3 hari	per 2hari	per 2 hari	perhari	perhari					
7	Jumlah kendaraan pengangkut sampah yang dikelola oleh Kecamatan  Sepeda motor roda 3  Kendaraan roda 2  Truk sampah	16 - 2	2 2 -	3 3 -	3 - -	4 - 1	16 - 2	2 3 -	2 3 -	3 - -	4 - 1	19 - 2	100 150 -	75 100 -	100 - -	100 - 100	118 - 100
8	Jumlah kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	9 KSM	9 KSM	9 KSM	6 KSM	6 KSM	6 KSM	9 KSM	9 KSM	6 KSM	6 KSM	6 KSM	100	100	100	100	100
9	Jenis dan jumlah lapangan olah raga milik umum (bukan milik perseorangan/perusahaan) yang ada di wilayah Kecamatan	3 Jenis - 18 Lap. Sepakbola - 3 Lap.Futsal - 8 lap.volley	3 Jenis - 17 Lap. Sepakbola - 1 Lap.Futsal - 2 lap.volley	3 Jenis - 18 Lap. Sepakbola - 1 Lap.Futsal - 2 lap.volley	3 Jenis - 18 Lap. Sepakbola - 1 Lap.Futsal - 2 lap.volley	3 Jenis - 18 Lap. Sepakbola - 1 Lap.Futsal - 3 lap.volley	3 Jenis - 18 Lap. Sepakbola - 3 Lap.Futsal - 8 lap.volley	3 Jenis - 18Lap . Sepakbola - 1 Lap.Futsal - 2 lap.Volley	3 Jenis - 18Lap . Sepakbola - 1 Lap.Futsal - 2 lap.Volley	3 Jenis - 18Lap . Sepakbola - 1 Lap.Futsal - 2 lap.Volley	3 Jenis - 18Lap . Sepakbola - 1 Lap.Futsal - 6 lap.Volley	3 Jenis - 18 Lap. Sepakbola - 3 Lap.Futsal - 8 lap.Volley	100	100	100	100	100
10	Jenis dan jumlah lapangan olah raga yang dibangun oleh Pemerintah Kota Semarang melalui Kecamatan	1	-	1	-	2	1	1	1	-	1	1	100	100	-	50	100
11	Jenis, lokasi dan jumlah kejadian bencana alam yang terjadi di wilayah kecamatan	2 jenis (tanah longsor)	-	-	-	-	2 jenis (tanah longsor)	2 jenis (tanah longsor)	2 jenis (tanah longsor)	2 Jenis (longsor dan	2 Jenis (longsor dan	2 Jenis (longsor dan	-	-	-	-	100

		dan kekeringan)					dan kekeringan)	dan kekeringan)	dan kekeringan)	kekeringan)	angin ribut)	kekeringan)					
12	Jumlah korban bencana alam yang terjadi di wilayah Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Jumlah perkiraan kerugian yang diderita akibat bencana alam (dirinci tiap kejadian bencana)	150.000.000	-	-	-	-	-	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Rp 10.000.000	Bencana longsor (kurang lebih Rp 200.000.000)	Bencana longsor (kurang lebih Rp 20.000.000) kekeringan kurang lebih (10.000.000)					
14	Jumlah sarana dan prasarana pemerintah yang dibangun	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	100	100	-	-	-
	🏠 Kantor Kecamatan	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	100	100	-	-	-
	🏠 Rumah Dinas Camat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
	🏠 Kantor Kelurahan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
	🏠 Rumah Dinas Lurah	3	2	2	0	2	0	2	2	0	1	0	100	100	-	50	-
	🏠 Balai Kelurahan																

15	Jumlah sarana dan prasarana pemerintahan yang diperbaiki	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	100	100	0	0	100
	🏠 Kantor Kecamatan	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	-	100	0	0	-
	🏠 Rumah Dinas Camat	16	-	2	2	10	8	-	-	3	12	9	-	0	120	150	112
	🏠 Kantor Kelurahan	16	-	2	0	10	0	-	-	0	8	0	-	0	80	800	-
	🏠 Rumah Dinas Lurah	16	-	-	1	10	2	-	-	2	12	2	-	-	120	600	100
	🏠 Balai Kelurahan																
16	Jenis dan jumlah sarana dan prasarana umum yang dibangun oleh Pemerintah Kota Semarang melalui Kecamatan.	21	1	1	3	26	21	1	1	3	26	21	100	100	100	100	100
17	Jenis dan jumlah sarana dan prasarana umum yang diperbaiki oleh Pemerintah Kota Semarang melalui kecamatan	30	21	50 lokasi	-	-	-	24 lokasi	24 lokasi	-	-	-	114	45	-	-	-
18	Jumlah pengaduan masyarakat kepada kecamatan atas pelayanan publik	10 pengaduan	2 pengaduan	2 pengaduan	2 pengaduan	3 pengaduan	3 pengaduan	2 pengaduan	2 pengaduan	4 pengaduan	3 pengaduan	3 pengaduan	100	100	200	100	100
19	Jumlah pengaduan yang dapat ditangani dan diselesaikan kecamatan	10 pengaduan	2 pengaduan	2 pengaduan	2 pengaduan	3 pengaduan	3 pengaduan	2 pengaduan	2 pengaduan	4 pengaduan	3 pengaduan	3 pengaduan	100	100	200	100	100

20	Jumlah pengaduan yang diteruskan kepada unit kerja /PD/Instansi terkait	10 pengaduan	1 pengaduan	2 pengaduan	2 pengaduan	3 pengaduan	3 pengaduan	2 pengaduan	2 pengaduan	4 pengaduan	3 pengaduan	3 pengaduan	100	100	200	100	100
21	Jumlah dan jenis kegiatan swadaya masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik di lingkungan	480	457	150	153	227	217	455	150	153	227	217	99	100	100	100	100
22	Nilai swadaya masyarakat	Rp 1.900.00 0. 000	Rp 2.500.0 00.000	Rp 200.00 0.000	Rp 150.00 0.000	Rp 500.00 0.000	Rp 1.900.0 00. 000	Rp 1.460.6 02.495	Rp 280.09 5.000	Rp 181.00 0.000	Rp 1.806.7 15.200	Rp 2.542.5 60.000	58	140	120	361	133
23	Jumlah keluarga miskin di wilayah kecamatan	6.000 KK	7.200 KK	6.800 KK	6.400 KK	6.000 KK	6.000 KK	7.132 KK	7.132 KK	6.302 KK	6.302 KK	5.726 KK	99	104	98	105	95

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Semarang Selatan

Sebagai Unsur perangkat daerah sekaligus penyelenggara pemerintahan, Kecamatan beserta kelurahan merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Berkaitan dengan pelayanan, Kecamatan Semarang Selatan berkomitmen untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat

Disamping pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat sangat penting artinya dalam pembangunan. Masyarakat yang mampu membangun dirinya sendiri diharapkan mampu menjaga ketahanan terhadap permasalahan yang timbul.

Pembangunan merupakan tugas semua lapisan masyarakat. Perempuan sebagai bagian dari masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan pria. Apalagi wanita merupakan bagian yang dominan dalam menciptakan keluarga yang sehat dan kuat. Untuk itu Pemerintah Kecamatan Semarang Selatan senantiasa berusaha memberikan kesempatan seluas-luasnya serta mendorong peran serta perempuan dalam program dan kegiatan baik di tingkat RT, RW, Kelurahan maupun kecamatan.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya terutama berkaitan dengan pelayanan publik, Kecamatan Semarang Selatan menghadapi permasalahan-permasalahan yang merupakan tantangan yang perlu ditangani secara serius dan terpadu dengan Dinas/Instansi terkait serta kerjasama dengan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di wilayah.

Adapun permasalahan-permasalahan tersebut antara lain :

1. Jumlah warga miskin di Kecamatan Semarang Selatan yang dapat dilihat dari data Gakin yang menerima beras raskin di masing-masing kelurahan
2. Adanya pengangguran yang dapat dilihat dari hasil pengolahan data profil kelurahan.
3. Masih tingginya Penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kecamatan Semarang Selatan
4. Adanya daerah rawan bencana banjir dan tanah longsor di beberapa wilayah kelurahan

5. Jumlah pegawai dan beban kerja yang diemban kurang seimbang sehingga pegawai dilingkungan Kecamatan Semarang Selatan selama ini cenderung bekerja serabutan.
6. Banyaknya sarana dan prasarana gedung ataupun jalan yang mengalami kerusakan sehingga perlu adanya perbaikan
7. Banyaknya Home Industri yang belum mendapat perhatian lebih serius untuk peningkatan pendapatan warga masyarakat sekaligus potensi yang dapat ditularkan kepada warga miskin
8. Kurang maksimalnya pemberdayaan ekonomi dan sosial keluarga karena kurang melibatkan peranan perempuan.
9. Perlunya pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui program Keluarga Berencana.

Disamping permasalahan di atas Kecamatan Semarang Selatan memiliki potensi yang tidak kalah penting untuk mendapat perhatian agar pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum berjalan lancar. Potensi-potensi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Adanya Instansi Vertikal (KUA dan Statistik), Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang merupakan kepanjangan tangan Badan/Dinas serta KORAMIL dan POLSEK yang merupakan bagian dari MUSPIKA di lingkungan Kecamatan Semarang Selatan.
2. Adanya LPMK, FIM/KIM, RW, RT, Karang Taruna, TP.PKK/Kelompok PKK dan Lembaga-lembaga lain baik yang bersifat Sosial maupun Keagamaan di lingkungan Kecamatan Semarang Selatan;

Salah satu proses dalam konsep manajemen adalah menyusun faktor penentu keberhasilan yang diawali dengan mengkaji lingkungan strategis yang meliputi kondisi, situasi, keadaan, peristiwa, dan pengaruh-pengaruh yang berasal dari dalam maupun luar. Lingkungan internal dan eksternal mempunyai dampak pada kinerja seluruh komponen yang terlibat, mencakup kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan tantangan eksternal.

Analisis lingkungan strategis adalah menyusun asumsi-asumsi strategis dan mengujinya dengan visi dan misi Perangkat Daerah untuk memperoleh faktor penentu keberhasilan.

II.4.1 Analisis Lingkungan Strategis

Pelaksanaan analisis lingkungan strategis merupakan bagian dari komponen perencanaan strategis dan merupakan suatu proses untuk selalu menempatkan Perangkat Daerah pada posisi strategis sehingga dalam perkembangannya akan selalu berada pada posisi yang menguntungkan. Lingkup analisis lingkungan strategis meliputi Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE).

II.4.1.1 Analisis Lingkungan Internal (ALI)

a. Kekuatan

Kantor Camat Semarang Selatan Kota Semarang mempunyai beberapa faktor kekuatan yang menjadi pendukung dalam menyusun suatu perencanaan pembangunan. Faktor kekuatan tersebut adalah :

- 1) Sebagian besar SDM berpendidikan SLTA keatas;
- 2) Tersedianya prasarana dan sarana untuk menunjang pelaksanaan Pemerintahan dan pembangunan maupun pelayanan terhadap masyarakat;
- 3) Adanya jaringan kerjasama antar unit kerja baik secara internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada;
- 4) Adanya struktur organisasi, pembagian tugas pokok dan fungsi aparatur di lingkungan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna menuju pemerintahan yang baik (Good Governance).

b. Kelemahan

Analisis kondisi internal menunjukkan bahwa Kantor Camat Semarang Selatan mempunyai beberapa kelemahan sebagai berikut :

- 1) Terbatasnya ketrampilan penyusunan perencanaan program kegiatan aparatur Kecamatan Semarang Selatan sebagai akibat dari kurangnya pemahaman tugas pokok dan fungsi masing-masing sehingga berakibat pula pada kurangnya kualitas dokumen perencanaan. Kurang berkualitasnya dokumen perencanaan berimplikasi kurang maksimalnya implementasinya;
- 2) Terbatasnya sumber daya manusia aparatur yang berkualitas. Hal ini terasa sekali manakala ada kegiatan yang harus dilaksanakan bersamaan pada tempat berbeda. Sementara aparatur yang tersedia belum memadai secara kompetensi dan kapabilitas. Hal ini tentu menyulitkan organisasi dalam upaya menunjang kinerjanya;
- 3) Kurangnya koordinasi antar aparatur. Kurangnya koordinasi disebabkan komunikasi yang tersumbat. Mengakibatkan kurangnya keselarasan gerak, kurangnya keselarasan pemahaman, pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan carut marut. Menimbulkan konflik antar aparatur;
- 4) Kurangnya konsistensi aparatur dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran. Tercermin dari munculnya kegiatan yang tidak dibutuhkan, sementara kegiatan yang seharusnya ada menjadi tidak terlaksana.
- 5) Ketersediaan data belum maksimal, padahal hal ini sangat penting sekali bagi pelaksanaan program yang ada;
- 6) Belum lengkapnya SOP (Standar Operasi dan Prosedur) pelaksanaan tugas di Kantor Camat Semarang Selatan. Adanya SOP yang memadai merupakan acuan bagi aparatur pelaksanaan tugas kedinasan maupun pelayanan serta bagi masyarakat sebagai pengguna jasa ;

- 7) Sarana dan prasarana yang tersedia belum memadai, Kurangnya sarana prasarana mempengaruhi pelaksanaan program kegiatan dan kualitas pelayanan yang diberikan;

II.4.1.2 Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

a. Tantangan

- 1) Tuntutan implementasi Good Governance merupakan tantangan pada Kantor Camat Semarang Selatan untuk meningkatkan kinerja;
- 2) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- 3) Kurang optimalnya peran serta lembaga Kemasyarakatan yang ada dalam menggerakkan masyarakat untuk mengatasi permasalahan dilingkungannya seperti pengentasan kemiskinan, ketentraman dan ketertiban lingkungan;
- 4) Kurangnya integrasi dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan yang komprehensif dari instansi vertikal sehingga menyebabkan tidak maksimalnya daya dukung pencapaian kinerja. Dengan adanya integrasi program dan kegiatan diharapkan percepatan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota. Misalnya pelaksanaan perbaikan sarana prasarana umum jalan usulan masyarakat terintegrasi dengan pembuatan biopori akan mengatasi masalah kerusakan infrastruktur sekaligus meningkatkan cadangan air tanah yang diharapkan dapat mengambat penurunan tanah, dalam rangka pengentasan kemiskinan misalnya, perlu adanya upaya pembedayaan warga miskin melalui kegiatan yang timbul dalam pelaksanaan program kegiatan perangkat daerah.

b. Peluang

- 1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan wewenang yang lebih luas bagi kecamatan untuk menangani urusan pemerintahan umum terutama menjalankan fungsi koordinasi dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum;
- 2) Keberadaan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang. Antara lain melalui meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
- 3) Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.

II.4.2. Analisis Strategi Pilihan

Strategi adalah kegiatan, mekanisme, atau sistem untuk mengantisipasi secara menyeluruh dan meramalkan pencapaian tujuan ke depan melalui pendekatan rasional. Strategi ini disusun dengan memadukan antara kekuatan (strength, S) dengan peluang (opportunity, O) yang dikenal sebagai strategi S-O, memadukan kelemahan (weakness, W) dengan peluang (opportunity, O) yang dikenal sebagai strategi W-O, dan memadukan kekuatan (strength, S) dengan ancaman (threat, T) yang dikenal sebagai strategi S-T.

Strategi S-O dimaksudkan sebagai upaya memaksimalkan setiap unsur kekuatan yang dimiliki untuk merebut setiap unsur peluang yang ada seoptimal mungkin, strategi W-O dimaksudkan sebagai upaya memperbaiki masing-masing unsur kelemahan agar dapat memanfaatkan seoptimal mungkin setiap unsur peluang yang ada, sedangkan strategi S-T dimaksudkan sebagai upaya untuk memaksimalkan setiap unsur kekuatan untuk menangkal dan menundukkan setiap unsur tantangan seoptimal mungkin.

Dengan demikian akan diperoleh berbagai strategi pilihan yang merupakan hasil perpaduan antar unsur kekuatan,

kelemahan, dan peluang. Masing-masing strategi pilihan tersebut harus diuji kembali relevansi dan kekuatan relasinya dengan visi, misi, dan nilai-nilai Perangkat Daerah.

1. Strategi Antara Kekuatan dan Peluang (S-O)

Kekuatan (S)	Peluang (O)	Strategi S-O
<p>1) Sebagian besar SDM berpendidikan SLTA keatas;</p> <p>2) Tersedianya prasarana dan sarana untuk menunjang pelaksanaan Pemerintahan dan pembangunan maupun pelayanan terhadap masyarakat;</p> <p>3) Adanya jaringan kerjasama antar unit kerja baik secara internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada;</p> <p>4) Adanya struktur organisasi, pembagian tugas pokok dan fungsi aparatur di lingkungan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna menuju pemerintahan yang baik (Good Governance).</p>	<p>1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan wewenang yang lebih luas bagi kecamatan untuk menangani urusan pemerintahan umum terutama menjalankan fungsi koordinasi dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum;</p> <p>2) Keberadaan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang. Antara lain melalui meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;</p> <p>3) Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan</p>	<p>1) Meningkatkan pemahaman tugas pokok dan fungsi serta ketrampilan aparatur untuk menangani urusan pemerintahan umum terutama menjalankan fungsi koordinasi dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum</p> <p>2) Memanfaatkan prasarana dan sarana untuk menunjang pelaksanaan Pemerintahan serta menguatkan fungsi koordinasi dan kerjasama baik antar apartur maupun dengan masyarakat, dunia usaha serta instansi terkait dalam melaksanakan program pembangunan maupun pelayanan terhadap masyarakat;</p> <p>3) Menguatkan jaringan kerjasama antar unit kerja baik secara internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program dan kegiatan bersama lembaga kemasyarakatan yang ada</p> <p>4. Menguatkan rentang komando organisasi dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan terhadap masyarakat.</p>

2. Strategi Antara Kelemahan dan Peluang (W-O)

Kelemahan (W)	Peluang (O)	Strategi W-O
<p>1) Terbatasnya ketrampilan penyusunan perencanaan program kegiatan aparatur Kecamatan Semarang Selatan sebagai akibat dari kurangnya pemahaman tugas pokok dan fungsi masing-masing sehingga berakibat pula pada kurangnya kualitas dokumen perencanaan. Kurang berkualitaskannya dokumen perencanaan berimplikasi kurang maksimalnya implementasinya;</p> <p>2) Terbatasnya sumber daya manusia aparatur yang berkualitas. Hal ini terasa sekali manakala ada kegiatan yang harus dilaksanakan bersamaan pada tempat berbeda. Sementara aparatur yang tersedia belum memadai secara kompetensi dan kapabilitas. Hal ini tentu menyulitkan organisasi dalam upaya menunjang kinerjanya;</p> <p>3) Kurangnya koordinasi antar aparatur. Kurangnya koordinasi disebabkan komunikasi yang tersumbat. Mengakibatkan kurangnya keselarasan gerak, kurangnya keselarasan pemahaman, pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan carut marut.</p>	<p>1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan wewenang yang lebih luas bagi kecamatan untuk menangani urusan pemerintahan umum terutama menjalankan fungsi koordinasi dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum;</p> <p>2) Keberadaan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang. Antara lain melalui meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;</p> <p>3) Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.</p>	<p>1. Meningkatkan ketrampilan penyusunan dokumen perencanaan melalui diskusi kelompok budaya kerja yang ada serta mengirimkan aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis dalam Penyusunan dokumen perencanaan yang diselenggarakan oleh pemerintah kota</p> <p>2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur yang ada melalui peningkatan intensitas rapat koordinasi, teamwork maupun diskusi tentang pelaksanaan program dan kegiatan dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti sosial media, dll.</p> <p>3. Memperkuat konsistensi aparatur dalam pelaksanaan program dan kegiatan dengan cara penguatan penyusunan rencana aksi semua aparatur untuk membagi habis kegiatan yang tertuang dalam dokumen perencanaan.</p> <p>4. Peningkatan validitas dan manajemen data dengan didukung anggaran yang mencukupi</p>

<p>Menimbulkan konflik antar aparat; 4) Kurangnya konsistensi aparat dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran. Tercermin dari munculnya kegiatan yang tidak dibutuhkan, sementara kegiatan yang seharusnya ada menjadi tidak terlaksana.</p> <p>5) Ketersediaan data belum maksimal, padahal hal ini sangat penting sekali bagi pelaksanaan program yang ada;</p> <p>6) Belum lengkapnya SOP (Standar Operasi dan Prosedur) pelaksanaan tugas di Kantor Camat Semarang Selatan. Adanya SOP yang memadai merupakan acuan bagi aparat pelaksanaan tugas kedinasan maupun pelayanan serta bagi masyarakat sebagai pengguna jasa ;</p> <p>7) Sarana dan prasarana yang tersedia belum memadai, Kurangnya sarana prasarana mempengaruhi pelaksanaan program kegiatan dan kualitas pelayanan yang diberikan;</p>		<p>5. Peningkatan sarana dan prasarana guna menjalin hubungan yang baik dengan pihak lain.</p> <p>6. Penyusunan SOP diKecamatan Semarang Selatan</p> <p>7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja yang memadai melalui perencanaan yang baik</p>
--	--	--

3. Strategi Antara Kekuatan dan Ancaman (S-T)

Kekuatan (S)	Ancaman (T)	Strategi S-T
<p>1) Sebagian besar SDM berpendidikan SLTA keatas;</p> <p>2) Tersedianya prasarana dan sarana untuk menunjang pelaksanaan Pemerintahan dan pembangunan maupun pelayanan terhadap masyarakat;</p> <p>3) Adanya jaringan kerjasama antar unit kerja baik secara internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada;</p> <p>4) Adanya struktur organisasi, pembagian tugas pokok dan fungsi aparatur di lingkungan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna menuju pemerintahan yang baik (Good Governance).</p>	<p>1) Tuntutan implementasi Good Governance merupakan tantangan pada Kantor Camat Semarang Selatan untuk meningkatkan kinerja;</p> <p>2) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan;</p> <p>3) Kurang optimalnya peran serta lembaga Kemasyarakatan yang ada dalam menggerakkan masyarakat untuk mengatasi permasalahan dilingkungannya seperti pengentasan kemiskinan, ketentraman dan ketertiban lingkungan;</p> <p>4) Kurangnya integrasi dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan yang komprehensif dari instansi vertikal sehingga menyebabkan tidak maksimalnya daya dukung pencapaian kinerja.</p>	<p>1) Menggunakan SDM berkependidikan dalam mewujudkan good governance;</p> <p>2) Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana untuk pelayanan maupun mengedukasi masyarakat agar aktif dalam pembangunan;</p> <p>3) menguatkan jejaring kerjasama antar unit kerja baik secara internal maupun eksternal dalam memberdayakan masyarakat dan lembaga;</p> <p>4) Menguatkan rentang komando organisasi untuk memberikan masukan kepada instansi vertikal dalam upaya mengatasi masalah yang ada di masyarakat secara terstruktur dan integral yang dapat mempercepat pencapaian visi dan misi Walikota Semarang</p>

4. Strategi Kelemahan dan Ancaman (W-T)

Kelemahan (W)	Ancaman (T)	Strategi W-T
<p>1)Terbatasnya ketrampilan penyusunan perencanaan program kegiatan aparatur Kecamatan Semarang Selatan sebagai akibat dari kurangnya pemahaman tugas pokok dan fungsi masing-masing sehingga berakibat pula pada kurangnya kualitas dokumen perencanaan. Kurang berkualitasnya dokumen perencanaan berimplikasi kurang maksimalnya implementasinya;</p> <p>2)Terbatasnya sumber daya manusia aparatur yang berkualitas. Hal ini terasa sekali manakala ada kegiatan yang harus dilaksanakan bersamaan pada tempat berbeda. Sementara aparatur yang tersedia belum memadai secara kompetensi dan kapabilitas. Hal ini tentu menyulitkan organisasi dalam upaya menunjang kinerjanya;</p> <p>3)Kurangnya koordinasi antar aparatur. Kurangnya koordinasi disebabkan komunikasi yang tersumbat. Mengakibatkan kurangnya keselarasan gerak, kurangnya keselarasan pemahaman, pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan carut marut.</p>	<p>1) Tuntutan implementasi Good Governance merupakan tantangan pada Kantor Camat Semarang Selatan untuk meningkatkan kinerja;</p> <p>2) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan;</p> <p>3) Kurang optimalnya peran serta lembaga Kemasyarakatan yang ada dalam menggerakkan masyarakat untuk mengatasi permasalahan dilingkungannya seperti pengentasan kemiskinan, ketentraman dan ketertiban lingkungan;</p> <p>4) Kurangnya integrasi dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan yang komprehensif dari instansi vertikal sehingga menyebabkan tidak maksimalnya daya dukung pencapaian kinerja.</p>	<p>1)Kurangnya ketrampilan penyusunan perencanaan program kegiatan aparatur dapat mengakibatkan gagalnya mewujudkan good governance</p> <p>2)Kurangnya sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dapat menimbulkan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang menimbulkan turunnya kepercayaan masyarakat</p> <p>3)Kurangnya koordinasi antar aparatur menghambat pelaksanaan program dan kegiatan utamanya yang berkaitan langsung dengan masyarakat maupun lembaga yang ada</p> <p>4)Kurangnya konsistensi aparatur dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan berakibat kurang optimalnya hasil yang dicapai</p> <p>5)Ketidaktersediaan data yang akurat dapat mengakibatkan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan;</p> <p>6)Belum lengkapnya SOP (Standar Operasi dan Prosedur) pelaksanaan tugas di Kantor Camat Semarang Selatan. Adanya SOP yang memadai</p>

<p>Menimbulkan konflik antar aparat;</p> <p>4) Kurangnya konsistensi aparat dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran. Tercermin dari munculnya kegiatan yang tidak dibutuhkan, sementara kegiatan yang seharusnya ada menjadi tidak terlaksana.</p> <p>5) Ketersediaan data belum maksimal, padahal hal ini sangat penting sekali bagi pelaksanaan program yang ada;</p> <p>6) Belum lengkapnya SOP (Standar Operasi dan Prosedur) pelaksanaan tugas di Kantor Camat Semarang Selatan. Adanya SOP yang memadai merupakan acuan bagi aparat pelaksanaan tugas kedinasan maupun pelayanan serta bagi masyarakat sebagai pengguna jasa ;</p> <p>7) Sarana dan prasarana yang tersedia belum memadai, Kurangnya sarana prasarana mempengaruhi pelaksanaan program kegiatan dan kualitas pelayanan yang diberikan;</p>		<p>menjadikan kebingungan masyarakat maupun aparat sendiri dalam pelayanan yang diberikan.</p> <p>7) Kualitas sarana dan prasarana yang belum memadai, mengurangi kenyamanan atas kualitas pelayanan yang diberikan;</p>
---	--	--

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Isu – isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan – tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas dalam prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan dimaksudkan agar layanan OPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu dalam perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan aspirasi masyarakat dan lingkungan.

Isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu keadaan yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis bagi OPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi OPD di masa lima tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi meliputi:

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Beberapa permasalahan beserta akar permasalahannya yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi aparatur

serta pelayanan masyarakat antara lain dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi masalah dan akar permasalahan

NO	PERMASALAHAN	AKAR PERMASALAHAN
1	2	3
1.	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	Belum optimalnya penyusunan dan penerapan SOP dan SP
		Belum optimalnya sarana prasarana pelayanan publik sesuai standar
		Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik
		Belum optimalnya budaya kerja aparatur
		Jumlah, kapabilitas, kapasitas dan kompetensi aparatur perlu ditingkatkan
2.	Masih adanya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundangan
		Masih kurangnya peran serta masyarakat untuk menjaga ketertiban dan ketentraman lingkungan
		Kuantitas dan kualitas anggota Linmas belum memadai
3.	Perlu peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan perlu dioptimalkan
		Koordinasi lintas sektor untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat perlu dioptimalkan
4.	Perlu peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di lingkungan perlu ditingkatkan
		Kondisi sarana dan prasarana lingkungan perlu perbaikan dan peningkatan
		Potensi lokal kewilayahan perlu dukungan pembinaan dan pengembangan
5.	Belum optimalnya penanganan kebersihan wilayah Kecamatan/Kelurahan	Pengelolaan kebersihan wilayah perlu ditingkatkan secara berkelanjutan
6.	Belum optimalnya program PHBS dan LHBS di wilayah	Peran serta dan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan lingkungan bersih

	Kelurahan dan Kecamatan	dan sehat perlu ditingkatkan
7.	Belum optimalnya pengelolaan aset Pemerintah di Kecamatan / Kelurahan	Perlu peningkatan tertib pencatatan dan pengelolaan aset Pemerintah di Kecamatan / Kelurahan
8.	Belum optimalnya penerimaan PAD dari Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan / Kelurahan	Perlu peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi Dan Bangunan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Kota Semarang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 yaitu : **"Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera"**

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut:

Hebat, mengandung arti bahwa masyarakat Kota Semarang yang bergerak untuk mencapai keunggulan dan kemuliaan, serta kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap memperhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan perdagangan dan jasa. Semarang yang Hebat dapat terlihat antara lain melalui kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa-jasa terhadap PDRB dan kontribusi kategori industri pengolahan terhadap PDRB yang semakin meningkat, nilai investasi yang semakin besar, laju pertumbuhan ekonomi yang tiap tahun terus meningkat, serta luas genangan banjir dan rob yang semakin menurun.

Sejahtera, mengandung arti bahwa dalam lima tahun kedepan, masyarakat kota Semarang akan semakin meningkat kesejahteraannya dengan pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar maupun sarana prasarana penunjang. Peningkatan kesejahteraan tersebut antara lain ditunjukkan melalui peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) serta penurunan angka kemiskinan dan pengangguran

Jadi visi tersebut secara garis besar mengandung maksud bahwa Semarang sebagai kota metropolitan berwawasan lingkungan akan menjadi kota yang handal dan maju ddalam

perdagangan dan jasa, dengan dukungan infrastruktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan dukungan pengembangan politik, keamanan, ekonomi dan budaya.

Misi Kota Semarang Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari Misi Tahap IV dalam RPJPD Kota Semarang 2005-2025 dan integrasi dari sasaran yang akan dicapai pada Misi Tahap IV tersebut. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan misi adalah: Manusia yang berdaya saing, ekonomi kokoh, tata kelola pemerintah yang baik, infrastruktur berkelanjutan, serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan Kota Semarang. Kelima hal ini merupakan bidang garapan besar yang akan menjadi sebuah panduan dalam bagaimana memandang pembangunan di Kota Semarang. Adapun Misi tersebut terdiri dari:

1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas.
2. Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Meningkatkan Pelayanan Publik.
3. Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan Lingkungan.
4. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha yang Kondusif.

Pesan mendasar visi yang dijabarkan dalam misi-misi pembangunan Kota Semarang dalam waktu lima tahun kedepan adalah untuk membuat masyarakat semakin sejahtera, maka upaya untuk meningkatkan pelayanan public, pengembangan kehidupan berdemokrasi, pemerataan dan keadilan harus benar-benar dilaksanakan secara konsisten. Karena itulah, dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut diperlukan semangat baru dalam pelaksanaan pembangunan yang berlandaskan nilai dasar bangsa Indonesia dan masyarakat Semarang khususnya, yakni kegotongroyongan. Semangat baru tersebut tertuang dalam slogan : **” Bergerak Bersama Membangun Semarang ”**

Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada saat kampanye Pilkada merupakan substansi yang terkait erat dengan visi dan

misi dan akan menjadi pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun dan dituangkan kedalam Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Keberhasilan Kota Semarang yang hebat dan semakin sejahtera, secara umum tercapai bila :

Tabel 3.2
Telaah Visi Walikota Semarang

No.	Aspek	Indikator
1	SEMARANG HEBAT Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat	1. Penurunan tingkat pengangguran terbuka 2. Peningkatan iklim investasi 3. Peningkatan sektor perdagangan dan jasa dan industri olahan
2	Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera	1. Peningkatan Indeks Pembangunan Gender 2. Penurunan angka kemiskinan 3. Indeks Pembangunan Manusia yang sejajar/lebih tinggi dengan kota lain

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terpilih telah ditetapkan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Telaah Misi dan Tujuan Walikota Semarang

Misi		Tujuan	
1.	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas	1.1	Meningkatkan kualitas SDM
		1.2	Meningkatkan nilai-nilai budaya masyarakat
2.	Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Meningkatkan Pelayanan Publik	2.1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani
		2.2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik
		2.3	Mewujudkan Kota Semarang yang tentram, tertib dan nyaman

3.	Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan Lingkungan	3.1	Mewujudkan tata ruang yang terpadu dan berkelanjutan
		3.2	Mewujudkan system pengelolaan drainase kota yang terintegrasi
		3.3	Mewujudkan system transportasi kota yang terintegrasi dan berkelanjutan
		3.4	Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana dasar perkotaan
		3.5	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan
4.	Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha yang Kondusif	4.1	Menjamin ketahanan pangan bagi penduduk
		4.2	Meningkatkan sektor perdagangan dan jasa
		4.3	Mendorong pengembangan investasi dan ekonomi local berdaya saing global

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang tahun 2011-2031, memiliki kebijakan utama pembentukan struktur tata ruang. Pengembangan sistem pusat pelayanan dibagi dalam BWK-BWK (Pembagian Wilayah Kota) yaitu terdiri atas :

- a. BWK I meliputi Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Timur dan Kecamatan Semarang Selatan dengan luas kurang lebih 2.223 (dua ribu dua ratus dua puluh tiga) hektar;

- b. BWK II meliputi Kecamatan Candisari dan Kecamatan Gajahmungkur dengan luas kurang lebih 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) hektar;
- c. BWK III meliputi Kecamatan Semarang Barat dan Kecamatan Semarang Utara dengan luas kurang lebih 3.522 (tiga ribu lima ratus dua puluh dua) hektar;
- d. BWK IV meliputi Kecamatan Genuk dengan luas kurang lebih 2.738 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh delapan) hektar;
- e. BWK V meliputi Kecamatan Gayamsari dan Kecamatan Pedurungan dengan luas kurang lebih 2.622 (dua ribu enam ratus dua puluh dua) hektar;
- f. BWK VI meliputi Kecamatan Tembalang dengan luas kurang lebih 4.420 (empat ribu empat ratus dua puluh) hektar;
- g. BWK VII meliputi Kecamatan Banyumanik dengan luas kurang lebih 2.509 (dua ribu lima ratus sembilan) hektar;
- h. BWK VIII meliputi Kecamatan Semarang Selatan dengan luas kurang lebih 5.399 (lima ribu tiga ratus Sembilan puluh sembilan) hektar;
- i. BWK IX meliputi Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 6.213 (enam ribu dua ratus tiga belas) hektar;
- j. BWK X meliputi Kecamatan Semarang Selatan dan Kecamatan Tugu dengan luas kurang lebih 6.393 (enam ribu tiga ratus Sembilan puluh tiga) hektar.

Pengembangan fungsi utama masing-masing BWK diatas yaitu:

- a. Perkantoran, perdagangan dan jasa di BWK I, BWK II, BWK III;
- b. Pendidikan kepolisian dan olah raga di BWK II;
- c. Transportasi udara dan transportasi laut di BWK III;
- d. Industri di BWK IV dan BWK X;
- e. Pendidikan di BWK VI dan BWK VIII;
- f. Perkantoran militer di BWK VII;
- g. Kantor pelayanan publik di BWK IX.

3.4 Penentuan Isu – Isu Strategis

Selama kurun lima tahun kedepan, Kecamatan Semarang Selatan dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif terutama dalam rangka menghadapi perubahan paradigma masyarakat di wilayah.

Perencanaan arah pembangunan di wilayah Kecamatan Semarang Selatan hendaknya memperhatikan perubahan kondisi wilayah dan masyarakat sehingga tujuan dari pembangunan tepat tujuan dan sasaran.

Dalam mengakomodir usulan pembangunan juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaan Musrenbang, dimana hal ini terkait dengan upaya mewujudkan perencanaan yang responsive gender. Diantaranya adalah keterlibatan berbagai organisasi / lembaga terkait pengarusutamaan gender, serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang.

Memperhatikan isu-isu yang ada, permasalahan pembangunan dan tujuan pelayanan pada masyarakat yang bertujuan pada *good governance*, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pada Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik ;
2. Peningkatan ketentraman dan ketertiban lingkungan;
3. Peningkatan keberdayaan masyarakat;
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
5. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Lingkungan Hidup Bersih Sehat (LHBS).

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

KECAMATAN SEMARANG SELATAN

Masalah merupakan kesenjangan antara das sollen atau teori dengan das sein atau fakta empiris; atau kesenjangan harapan dengan kenyataan atau antara yang ditetapkan sebagai kebijakan dengan kenyataan implementasi kebijakan.

Masalah perlu diidentifikasi, ditemukenali, diinventarisasi kemudian diatasi atau dipecahkan agar kenyataan sesuai dengan harapan. Penyelesaian atau pemecahan masalah adalah bagian dari proses berpikir. Sering dianggap merupakan proses paling kompleks diantara semua fungsi kecerdasan, pemecahan masalah telah didefinisikan sebagai proses kognitif tingkat tinggi yang memerlukan modulasi dan kontrol lebih dari keterampilan-keterampilan rutin atau dasar. Proses ini terjadi jika suatu organisme atau sistem kecerdasan buatan tidak mengetahui bagaimana untuk bergerak dari suatu kondisi awal menuju kondisi yang ditujuan

Pada tabel 3.1 bab 3 diatas telah ditemukan permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan termasuk akar masalah dari permasalahan itu sendiri. Berdasarkan permasalahan dan variabelnya telah ditarik isu-isu strategis yang melingkupinya. Maka kemudian dirumuskan tujuan dan sasaran. Selanjutnya tabel berikut adalah tindak lanjut penjabaran tabel 3.1 yaitu pengelompokan pemasalahan dan veriabelnya disesuaikan dengan isu-isu strategis guna merumuskan tujuan dan sasaran

TC.25 Tabel 4.1
Matrik Tujuan, Sasaran, Beserta Indikator Dan Target
Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2016 – 2021

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan dalam pembangunan			%	5,67	11,82	13,50	15,00	17,50	17,50
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan		%	5,67	11,82	13,50	15,00	17,50	17,50

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1. Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	%	5,67	11,82	13,50	15,00	17,50	17,50
Meningkatnya birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang bersih, melayani			%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Meningkatnya manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		1. Persentase capaian kinerja Kecamatan dan Kelurahan	%	98,00	98,00	98,00	99,00	99,00	99,00

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
		2. Cakupan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mencapai tujuan, dirancang secara konseptual, realistis dan sesuai kondisi yang ada. Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam Renstra dibutuhkan strategi.

Kemudian, kebijakan adalah arah/tindakan yang harus dipedomani oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan RENSTRA. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam pengelolaan program-program kegiatan pembangunan, maupun eksternal yaitu dalam rangka mengatur, memfasilitasi kegiatan kemasyarakatan. Adapun strategi dan kebijakan disusun berdasar tujuan dan sasaran OPD , maka keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1
Matrik Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan
Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2016 – 2021

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Strategi	Arah Kebijakan
VISI : SEMARANG KOTA PERDAGANGAN DAN JASA YANG HEBAT MENUJU MASYARAKAT SEMAKIN SEJAHTERA			
MISI : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas			
Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan dalam pembangunan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	1. Peningkatan keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah	1.1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana umum wilayah kecamatan dan kelurahan yang baik dan representatif

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Strategi	Arah Kebijakan
			1.2. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan mengembangkan potensi lokal wilayah kecamatan dan kelurahan
		2. Peningkatan wilayah kecamatan dan kelurahan yang bersih dan sehat berbasis pemberdayaan masyarakat	2.1. meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan perilaku dan lingkungan yang bersih serta sehat
			2.2. Meningkatkan kebersihan wilayah kecamatan dan kelurahan secara berkelanjutan
		3. Peningkatan ketertiban dan ketentraman lingkungan	3.1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketentraman lingkungan serta perlindungan masyarakat
MISI : Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik			
Meningkatnya birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang bersih, melayani	Meningkatnya manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	1. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan dan kelurahan	1.1. Meningkatkan manajemen penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik Kecamatan / Kelurahan

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Strategi	Arah Kebijakan
		2. Peningkatan pendayagunaan aset Kecamatan / Kelurahan	2.1. Meningkatkan manajemen pengelolaan aset pemerintah di Kecamatan dan Kelurahan
		3. Peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	3.1. Mengoptimalkan potensi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan dan Kecamatan secara intensif
		4. Peningkatan kualitas dan manajemen pelayanan publik	4.1. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik
		5. Peningkatan Kinerja Pelayanan Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan	5.1. Meningkatkan Kualitas Kinerja Aparatur Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan
			5.2. Meningkatkan Tertib Administrasi Pelaporan Kinerja dan Keuangan Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan
			5.3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Aparatur Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Program yang akan dilaksanakan adalah merupakan program prioritas RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021 yang telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Semarang Selatan, selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan yang di dasarkan pada strategi dan kebijakan jangka menengah.

Indikator kinerja yang telah ditetapkan adalah merupakan indikator kinerja program yang pada prinsipnya berisi outcome program, sedangkan kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan, untuk lokasi kegiatan adalah merupakan lokasi keberadaan kelompok sasaran yang akan menerima manfaat kegiatan secara langsung (kecamatan dan kelurahan).

Pada tabel berikut akan dijelaskan rumusan permasalahan pada Kecamatan Semarang Selatan yang akan diselesaikan dengan program dan kegiatan :

Tabel 6.1
Matrik Penyelesaian Permasalahan di Kecamatan dengan Program - Kegiatan

No .	Permasalahan Pokok	Akar Permasalahan	Kebijakan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6
1.	Belum optimalnya pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	1. Belum optimalnya penyusunan dan penerapan SOP dan SP 2. Belum optimalnya sarana prasarana pelayanan publik sesuai standar 3. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik 4. Belum optimalnya budaya kerja aparatur 5. Jumlah, kapabilitas, kapasitas dan kompetensi aparatur perlu ditingkatkan	1. Meningkatkan manajemen penyelenggaraan pemerintahan umum Kecamatan / Kelurahan 2. Meningkatkan koordinasi inter dan lintas sektoral di bidang pemerintahan umum 3. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik yg lebih baik 4. Meningkatkan sarana prasarana dan pemanfaatan teknologi informasi dlm pelayanan publik	Program Peningkatan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kecamatan 2. Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 3. Pengembangan Budaya Kerja dan Pembinaan Mental Rohani Aparatur 4. Broadband Learning Centre (BLC)

2.	Masih adanya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat	<p>1. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundangan</p> <p>2. Masih kurangnya peran serta masyarakat untuk menjaga ketertiban dan ketentraman</p> <p>3. Kuantitas dan kualitas anggota Linmas belum memadai</p>	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketentraman lingkungan serta perlindungan masyarakat	Program Peningkatan Ketentraman dan Kenyamanan Lingkungan	<p>1. Pendampingan Penegakan Perda di Kecamatan dan Pemantauan Wilayah Rawan Tramtibum</p> <p>2. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat</p>
3.	Perlu peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	<p>1. Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan perlu dioptimalkan</p> <p>2. Koordinasi lintas sektor untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat perlu dioptimalkan</p>	Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan mengembangkan potensi lokal wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	<p>1. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan</p> <p>2. Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (Gerbang Hebat - Kp.Tematik)</p>

4.	Perlu peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	<p>1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di lingkungan perlu ditingkatkan</p> <p>2. Kondisi sarana dan prasarana lingkungan perlu perbaikan dan peningkatan</p> <p>3. Potensi lokal kewilayahan perlu dukungan pembinaan dan pengembangan</p>	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana umum wilayah Kecamatan dan Kelurahan yang baik dan representatif	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan	<p>1. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan</p> <p>2. Pelaksanaan Musyawarah Peren - canaan Pembangunan Kelurahan</p> <p>3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan</p> <p>4. Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang</p> <p>5. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan, Jembatan</p> <p>6. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingk.</p> <p>7. Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Hasil Musrenbang</p>
----	--	---	---	--	---

5.	Belum optimalnya penanganan kebersihanwilayah Kecamatan / Kelurahan	Pengelolaan kebersihanwilayah perlu ditingkatkan secara berkelanjutan	Meningkatkan kebersihan wilayah Kecamatan dan Kelurahan secara berkelanjutan	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1. Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Persampahan 2. Koordinasi Penilaian Adipura
6.	Belum optimalnya program PHBS dan LHBS di wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peran serta dan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan lingkungan bersih dan sehat perlu ditingkatkan	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan perilaku dan lingkungan bersih serta sehat	Program Peningkatan Lingkungan Sehat	1. Fasilitasi Forum Kota Sehat (FKK) Kecamatan / Kelurahan
7.	Belum optimalnya pengelolaan aset Pemerintah di Kecamatan / Kelurahan	Perlu peningkatan tertib pencatatan dan pengelolaan aset Pemerintah di Kecamatan / Kelurahan	Meningkatkan manajemen pengelolaan aset Pemerintah di Kecamatan dan Kelurahan	Program Pengelolaan Aset Daerah	1. Monitoring Pengendalian Aset Kecamatan
8.	Belum optimalnya penerimaan PAD dari Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan / Kelurahan	Perlu peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi Dan Bangunan	Mengoptimalkan potensi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan dan Kecamatan secara intensif	Program Peningkatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah	1. Optimalisasi Pemungutan PBB oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan

9.	Perlunya pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan dan Kelurahan secara rutin untuk keberlangsungan operasional	<p>Kebutuhan rutin kantor Kecamatan dan Kelurahan terhadap :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran rekening listrik, telpon dan air tiap bulan untuk kantor 2. Alat tulis kantor 3. Barang cetakan dan penggandaan 4. Penggantian komponen instalasi listrik / lampu penerangan kantor 5. Penyediaan makanan dan minuman untuk rapat dan jamuan tamu 6. Perjalanan dinas ke luar daerah 7. Pembayaran jasa penunjang administrasi perkantoran 	Meningkatkan standar dan kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran Jasa Komunikasi , SDA, Listrik 2. Penyediaan Alat Tulis Kantor 3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 5. Penyediaan Makanan dan Minuman 6. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 8. Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran 9. Belanja operasional kelurahan
----	--	---	--	--	---

10	Perlunya pemenuhan kebutuhan untuk peningkatan sarana dan prasarana kerja / operasional aparatur Kecamatan dan Kelurahan	<p>Kebutuhan rutin kantor Kecamatan dan Kelurahan terhadap :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2. Pengadaan peralatan gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas Camat dan Lurah 4. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 5. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 6. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kerja 7. Pemeliharaan rutin / berkala mebelair 8. Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor, termasuk rumah dinas dan balai Kelurahan 9. Penyediaan jasa pemeliharaan perijinan kendaraan dinas (perpanjangan STNK) 	Meningkatkan penyediaan dan kualitas sarana prasarana aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 4. Pemeliharaan rutin / berkala Rumah Dinas 5. Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor 6. Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas 7. Pemeliharaan rutin /berkala Peralatan Gedung Kantor 8. Pemeliharaan rutin / berkala Mebelair 9. Rehabilitasi sedang / berat Gedung Kantor 10. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perijinan Kendaraan
----	--	---	--	---	--

					Dinas
11	Perlunya pemenuhan kebutuhan untuk peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	<p>Kebutuhan rutin SKPD Kecamatan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kecamatan 2. Menyusun Laporan Keuangan Semesteran 3. Menyusun Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 4. Menyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun 5. Menyusun RKA dan DPA 6. Menyusun LKjIP 7. Menyusun Renstra Perangkat Drh 8. Menyusun LKPJ Perangkat Drh 9. Menyusun Renja Perangkat Drh 10. Menunjang Kinerja PA, KPA, PPK, Bendahara dan Bendahara Pembantu 	Meningkatkan tertib dan kualitas perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 3. Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 4. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 5. Penyusunan RKA dan DPA 6. Penyusunan LKjIP 7. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 8. Penyusunan LKPJ Perangkat Drh 9. Penyusunan Renja Perangkat Daerah 10. Penunjang Kinerja PA, KPA, PPK, Bendahara dan Bendahara Pembangunan

Dari matrik penyelesaian permasalahan dengan program dan kegiatan diatas, berdasarkan permasalahan pokok dan akar permasalahan didapatkan kebijakan, program dan kegiatan yang dapat digunakan untuk penyelesaian masalah yang ada.

Keterkaitan permasalahan diatas dapat dilihat dalam matrik keterkaitan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan beserta indikatornya renstra kecamatan Semarang Selatan kota semarang tahun 2016 – 2021, sebagai berikut :

Tabel 6.2
Matrik keterkaitan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,
Program dan kegiatan beserta indikatornya
Renstra Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang tahun 2016 – 2021

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6
<p>Meningkatnya birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang bersih, melayani dan memberdayakan masyarakat</p> <p>Indikator :</p> <p>1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM):87</p>	<p>Sasaran 1 :</p> <p>Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan</p> <p>Indikator :</p> <p>1. Cakupan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik di Kecamatan dan kelurahan</p> <p>Formulasi :</p>	<p>2. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum dan Peningkatan kualitas manajemen pelayanan publik Kecamatan / Kelurahan</p>	<p>a. Meningkatkan manajemen penyelenggaraan pemerintahan umum Kecamatan / Kelurahan</p> <p>b. Meningkatkan koordinasi inter dan lintas sektoral di bidang pemerintahan umum</p>	<p>1. Program Peningkatan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum</p> <p>Sasaran :</p> <p>Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum serta pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan</p> <p>Indikator :</p> <p>a. Persentase ketersediaan sarpras pelayanan masyarakat berbasis PATEN</p> <p>b. Jumlah pelayanan administratif kepada</p>	<p>1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kecamatan</p> <p>Sasaran :</p> <p>Terselenggaranya tata pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan yang baik dan normatif</p> <p>Indikator :</p> <p>Jumlah pembinaan, monitoring dan evaluasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan</p>
					<p>2. Pengembangan Budaya Kerja dan Pembinaan Mental Rohani Aparatur</p> <p>Sasaran :</p> <p>Meningkatnya etos dan budaya kerja aparatur Kecamatan dan Kelurahan</p> <p>Indikator :</p> <p>Jumlah kegiatan pembinaan aparatur Kecamatan dan Kelurahan untuk peningkatan kapasitas dan</p>

	Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani dibagi total jumlah pengaduan masyarakat x 100 %			masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan	etos kerja
			<p>c.Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik</p> <p>d.Meningkatkan sarana prasarana & pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik</p>		<p>3.Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)</p> <p>Sasaran : Terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan yang berbasis PATEN</p> <p>Indikator : Jumlah pelayanan administratif dan ketersediaan sarana prasarana di Kantor Kecamatan dan Kelurahan yang berstandar PATEN</p> <p>4.Broadband Learning Centre (BLC)</p> <p>Sasaran : Meningkatnya pelayanan publik di bidang komunikasi dan informasi</p> <p>Indikator : Jumlah sarana prasarana komunikasi dan informasi masyarakat</p>
		3. Peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	Mengoptimalkan potensi pembayaran Pajak Bumi dan	2. Program Peningkatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli	<p>1.Optimalisasi Pemungutan PBB oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan</p> <p>Sasaran : Meningkatnya Pendapatan Asli</p>

			Bangunan di Kelurahan dan Kecamatan secara intensif	Daerah Sasaran : Meningkatnya perolehan pajak oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Indikator : Persentase jumlah wajib pajak yang membayar PBB di Kecamatan dan Kelurahan	Daerah (PAD) dari pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Indikator : Persentase Jumlah penerimaan pembayaran PBB Kelurahan se Kecamatan tahun berkenaan
		4. Peningkatan pendayagunaan aset Kecamatan / Kelurahan	Meningkatkan manajemen pengelolaan aset Pemerintah di Kecamatan dan Kelurahan	3. Program Pengelolaan Aset Daerah Sasaran : Terpeliharanya aset pemerintah di Kecamatan dan Kelurahan Indikator : Jumlah aset daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	1. Monitoring Pengendalian Aset Kecamatan Sasaran : Terwujudnya pencatatan dan pengelolaan aset pemerintah di Kecamatan dan Kelurahan yang tertib Indikator : Jumlah aset yang tercatat dan dikelola di Kecamatan dan Kelurahan
		5. Peningkatan wilayah Kecamatan yang	a. Meningkatkan kebersihan wilayah Kecamatan	4. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	1. Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Sasaran :

Indikator 2 : Tingkat Partisipasi Masyarakat (83,17%)		bersih dan sehat berbasis pemberdayaan masyarakat	dan Kelurahan secara berkelanjutan	Hidup Sasaran : Terpeliharanya kebersihan di wilayah Kecamatan dan Kelurahan Indikator : a. Cakupan kegiatan kebersihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan b. Persentase jumlah titik pantau Adipura yang tertangani	<p>Terselenggaranya kegiatan kebersihan di wilayah Kecamatan dan Kelurahan</p> <p>Indikator : Jumlah kegiatan kebersihan meliputi bilas sampah, bongkaran bangunan, tebangan pohon dll yang dilakukan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan</p>
	Sasaran 2 : 2. Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di kecamatan dan kelurahan Formulasi : Jumlah kegiatan non fisik		b. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan perilaku dan lingkungan bersih serta sehat	5. Program Pengembangan Lingkungan Sehat Sasaran : Meningkatkan jumlah Kelurahan yang mengimplementasikan program LHBS dan PHBS Indikator : Jumlah Kelurahan	2. Koordinasi Penilaian Adipura Sasaran : Terkoordinasinya kondisi yang dipersyaratkan Adipura di wilayah Kelurahan Indikator : Persentase jumlah titik pantau Adipura di Kelurahan yang tertangani
				1. Fasilitasi Forum Kecamatan dan Kelurahan Sehat Sasaran : Meningkatnya lingkungan di Kelurahan yang memenuhi LHBS dan PHBS Indikator : Persentase jumlah RW di Kelurahan yang memenuhi kriteria Lingkungan Hidup Bersih Sehat (LHBS) dan Perilaku Hidup Bersih Sehat (

	pemberdayaan hasil musrenbang dibagi jumlah semua kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan kelurahan x 100 %			yang melaksa-nakan program LHBS dan PHBS	PHBS)
		6. Peningkatan ketertiban dan ketentraman lingkungan	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketentraman lingkungan serta perlindungan masyarakat	6. Program Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Lingkungan Sasaran : Meningkatnya ketertiban dan ketentraman lingkungan melalui pemberdayaan masyarakat Indikator : Persentase jumlah sistem keamanan lingkungan (Siskamling) RT	1. Pendampingan Penegakan Perda di Kecamatan dan Pemantauan Wilayah Rawan Trantibum Sasaran : Meningkatnya ketertiban dan ketentraman lingkungan melalui penegakan peraturan dan pemantauan wilayah rawan trantibum Indikator : Persentase penurunan jumlah pelanggaran peraturan dan gangguan trantibum di Kelurahan se Kecamatan 2. Peningkatan Kapasitas Perlindungan Masyarakat Sasaran : Meningkatnya jumlah RT di Kelurahan se Kecamatan yang melaksanakan sistem keamanan lingkungan Indikator : Jumlah RT di Kelurahan se Kecamatan yang melaksanakan sistem keamanan lingkungan

		7. Peningkatan keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah	a. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan mengembang- kan potensi lokal wilayah Kecamatan dan Kelurahan	7. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan Sasaran : a. Meningkatnya jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan Indikator : Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan b. Meningkatnya jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Indikator : Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat - Kampung Tematik)	1. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan Sasaran : Meningkatnya jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan Indikator : Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan Kelurahan (LPMK, PKK, Karang Taruna, RW dan RT) 2. Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (Gerbang Hebat) Sasaran : Meningkatnya jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Indikator : Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kelurahan
--	--	---	---	---	---

			<p>b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana umum wilayah Kecamatan dan Kelurahan yang baik dan representatif</p>	<p>8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan</p> <p>Sasaran :</p> <p>a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dlm pembangunan melalui kehadiran perwakilannya di Musrenbang</p> <p>Indikator :</p> <p>Persentase kehadiran RT dalam Rembug Warga / Musrenbang</p> <p>b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui usulan pembangunan di Musrenbang</p> <p>Indikator :</p> <p>Persentase RT yang mengusulkan pembangunan dalam Musrenbang</p>	<p>1. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan</p> <p>Sasaran :</p> <p>Meningkatnya pembinaan dan partisipasi masyarakat melalui kegiatan kelompok masyarakat di Kelurahan</p> <p>Indikator :</p> <p>Jumlah kegiatan kelompok masyarakat di Kelurahan sebagai media pembinaan dan pemberdayaan</p> <p>2. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan</p> <p>Sasaran :</p> <p>Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui Musrenbang</p> <p>Indikator :</p> <p>Tersusunnya Daftar Skala Prioritas Pembangunan Tingkat RW, Kelurahan dan Kecamatan</p> <p>3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan</p> <p>Sasaran :</p> <p>Meningkatnya partisipasi masyarakat melalui berbagai kegiatan, monev dan lomba berbasis pemberdayaan</p>
--	--	--	---	---	---

				<p>c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui Musrenbang</p> <p>Indikator : Persentase kondisi sarana prasarana lingkungan Kelurahan yang ditangani lewat musrenbang</p>	<p>Indikator : Laporan hasil Monev, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan hasil Musrenbang</p>
					<p>4. Fasilitasi Pelaksanaan Hasil Musrenbang</p> <p>Sasaran : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik</p> <p>Indikator : Jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas tahun berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan</p>
					<p>5. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan</p> <p>Sasaran : Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan di Kecamatan dan Kelurahan melalui pelaksanaan hasil Musrenbang</p> <p>Indikator : Jumlah kegiatan pembangunan jalan dan jembatan di Kecamatan dan Kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang</p>

					<p>6. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan</p> <p>Sasaran : Meningkatnya kualitas saluran lingkungan di Kecamatan dan Kelurahan melalui pelaksanaan hasil Musrenbang</p> <p>Indikator : Jumlah kegiatan pembangunan saluran lingkungan di Kecamatan dan Kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang</p>
					<p>7. Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Hasil Musrenbang</p> <p>Sasaran : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pelaksanaan kegiatan pembangunan non fisik</p> <p>Indikator : Jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas tahun berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan</p>
	<p>Sasaran 2 : Meningkatnya manajemen Sumber Daya Aparatur dan</p>	<p>8. Fasilitasi peningkatan Sumber Daya Aparatur, Kinerja</p>	<p>a. Meningkatkan standar dan kualitas pelayanan</p>	<p>9. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</p> <p>Sasaran :</p>	<p>1. Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air, Listrik</p> <p>Sasaran : Tersedianya Komunikasi, sumber daya air dan penerangan kantor</p>

	<p>Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan</p> <p>Indikator:</p> <p>Persentase capaian kinerja Kecamatan dan Kelurahan</p> <p>Fomulasi :</p> <p>Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dibagi jumlah sarana dan prasarana yang diperlukan x 100 %</p>	<p>Pelayanan serta Tertib dan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan</p>	<p>administrasi perkantoran</p>	<p>Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran</p> <p>Indikator :</p> <p>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran</p>	<p>Indikator :</p> <p>Jumlah rekening telpon, air, listrik dan koran kantor</p>
					<p>2. Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor</p> <p>Sasaran :</p> <p>Tersedianya komponen listrik dalam menunjang penerangan kantor</p> <p>Indikator :</p> <p>Jumlah komponen listrik yang disediakan pada tahun berkenaan</p>
					<p>3. Penyediaan Alat Tulis Kantor</p> <p>Sasaran :</p> <p>Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor</p> <p>Indikator :</p> <p>Jumlah alat tulis kantor yang disediakan pada tahun berkenaan</p>
					<p>4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</p> <p>Sasaran :</p> <p>Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan kebutuhan kantor</p> <p>Indikator :</p> <p>Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan</p>

					<p>5. Penyediaan Makanan Dan Minuman</p> <p>Sasaran : Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat menunjang kinerja</p> <p>Indikator : Jumlah kegiatan rapat-rapat penunjang kinerja</p>
					<p>6. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah</p> <p>Sasaran : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan kementerian / lembaga terkait kinerja program</p> <p>Indikator : Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan</p>
					<p>7. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah</p> <p>Sasaran : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan Perangkat Daerah/ Lembaga / Instansi lainnya terkait kinerja program</p> <p>Indikator : Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan</p>

					<p>8. Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran</p> <p>Sasaran : Tersedianya jasa tenaga non ASN untuk menunjang administrasi perkantoran</p> <p>Indikator : Jumlah jasa tenaga non ASN untuk menunjang administrasi perkantoran</p>
					<p>9. Penyediaan operasional kelurahan</p> <p>Sasaran : Tersedianya penyediaan operasional kelurahan</p> <p>Indikator: Jumlah kegiatan penyediaan operasional kelurahan</p>
			<p>b. Meningkatkan penyediaan dan kualitas sarana prasarana aparatur</p>	<p>2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p> <p>Sasaran : Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana aparatur</p> <p>Indikator : Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana</p>	<p>1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor</p> <p>Sasaran : Meningkatnya fasilitas perlengkapan kantor yang mendukung kerja pegawai</p> <p>Indikator : Tersedianya fasilitas perlengkapan kantor yang mendukung kerja pegawai</p>

				Aparatur	<p>2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</p> <p>Sasaran : Meningkatnya fasilitas peralatan kantor yang mendukung kerja pegawai</p> <p>Indikator : Tersedianya fasilitas peralatan kantor yang mendukung kerja pegawai</p>
					<p>3. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional</p> <p>Sasaran : Meningkatnya fasilitas kendaraan dinas operasional yang mendukung kerja pegawai</p> <p>Indikator : Tersedianya fasilitas kendaraan dinas operasional yang mendukung kerja pegawai</p>
					<p>4. Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor</p> <p>Sasaran : Meningkatnya fungsi gedung kantor guna menunjang kinerja pegawai</p>

					<p>Indikator : Jumlah komponen gedung yang dilakukan pemeliharaan</p>
					<p>5. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas</p> <p>Sasaran :</p> <p>Meningkatnya fungsi rumha dinas guna menunjang pekerjaan</p> <p>Indikator :</p> <p>Jumlah kegiatan pemeliharaan rumah dinas</p>
					<p>6. Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor</p> <p>Sasaran : Berfungsinya peralatan gedung kantor guna menunjang kinerja</p> <p>Indikator : Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara</p>
					<p>7. Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas Operasional</p> <p>Sasaran : Meningkatnya fungsi kendaraan dinas operasional guna menunjang</p>

					<p>kinerja pegawai</p> <p>Indikator : Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan pemeliharaan</p>
					<p>8. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur</p> <p>Sasaran :</p> <p>Meningkatnya fungsi mebeleur guna menunjang pekerjaan</p> <p>Indikator:</p> <p>jumlah mebeleur yang diperbaiki</p>
					<p>9. Rehabilitasi Ringan / Sedang Gedung Kantor</p> <p>Sasaran : Meningkatnya fungsi gedung kantor guna meningkatkan kinerja pegawai</p> <p>Indikator : Jumlah perbaikan ringan / sedang gedung kantor</p>
					<p>10. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perijinan Kendaraan Dinas</p> <p>Sasaran :</p>

					<p>Meningkatnya pemeliharaan dan terpenuhinya perijinan kendaraan dinas operasional</p> <p>Indikator : Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional</p>
			c. Meningkatkan tertib dan kualitas perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan	<p>3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</p> <p>Sasaran : Meningkatnya dan dikembangkannya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>Indikator : Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</p>	<p>1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Sasaran : Meningkatnya kualitas Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah setiap tahun</p> <p>Indikator : Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah tahun berkenaan</p>
					<p>2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran</p> <p>Sasaran : Meningkatnya kualitas Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar</p>

					<p>Realisasi Kinerja Perangkat Daerah setiap tahun</p> <p>Indikator : Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah tahun berkenaan</p>
					<p>3. Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran</p> <p>Sasaran : Meningkatnya kualitas Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah setiap tahun</p> <p>Indikator : Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah</p>
					<p>4. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun..</p> <p>Sasaran : Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah</p> <p>Indikator : Tersusunnya Laporan Keuangan</p>

					Akhir Tahun Perangkat Daerah
					5. Penyusunan RKA dan DPA Sasaran : Meningkatnya kualitas RKA dan DPA Perangkat Daerah setiap tahun Indikator : Jumlah RKA dan DPA Perangkat Daerah
					6. Penyusunan LKjIP Sasaran : Meningkatnya kualitas LKjIP Perangkat Daerah setiap tahun Indikator : Tersusunnya LKjIP Perangkat Daerah
					7. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Sasaran : Meningkatnya kualitas Renstra Perangkat Daerah Indikator : Tersusunnya Renstra Perangkat Daerah

					<p>8. Penyusunan LKPJ Perangkat Daerah</p> <p>Sasaran : Meningkatnya kualitas LKPJ Perangkat Daerah</p> <p>Indikator : Tersusunnya LKPJ Perangkat Daerah</p>
					<p>9. Penyusunan Renja Perangkat Daerah</p> <p>Sasaran : Meningkatnya kualitas Renja Perangkat Daerah</p> <p>Indikator : Tersusunnya Renja Perangkat Daerah</p>
					<p>10. Penunjang Kinerja PA, KPA, PPK, Bendahara dan Bendahara Pembantu.</p> <p>Sasaran : Meningkatnya target kinerja PA, KPA, PPK, Bendahara dan Bendahara Pembantu</p> <p>Indikator : Terpenuhinya target kinerja PA,</p>

					KPA, PPK, Bendahara dan Bendahara Pembantu
--	--	--	--	--	--

6.2 Pendanaan Indikatif

Pendanaan program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan bersumber pada dana APBD Kota Semarang dengan indikasi sebagai berikut :

T-C.27 Tabel 6.3
Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah
 Kegiatan dan Indikator Output Kegiatan Renstra SKPD Kecamatan Semarang Selatan Tahun 2016-2021

Visi RPJMD	: Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera							
Misi RPJMD	: Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas							
Tujuan RPJMD	: Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat							
	Indikator Tujuan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Persen	75.45	79.32	80.25	81.17	81.95	83.17
Sasaran RPJMD	: Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan							
	Indikator Sasaran	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Persentase Tingkat partisipasi masyarakat	persen	69,00	79,32	71,00	72,00	73,00	75,00
Misi RPJMD	: Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik							
Tujuan RPJMD	: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani							
	Indikator Tujuan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	62.42	64.00	66.00	68.00	70.00	72.00
Sasaran RPJMD	: Terwujudnya birokrasi yang bersih dan melayani							

			Indikator Sasaran			Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			Indeks Kepuasan Masyarakat			persen	78,00	79,00	81,00	83,00	85,00	87,00
		TUJUAN / SASARAN/PROGRA M /KEGIATAN / Output Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Pada Tahun Awal	Tahun						
						2017	2018	2019	2020	2021		
						Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target		
Tujuan 1. Meningkatkan kapasitas pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan dalam pembangunan			Tingkat Partisipasi Masyarakat	%	69.00	70.00	71.00	72.00	73.00	75.00		
Sasaran 1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan			Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	%	5,67	11,82	13,50	15,00	17,50	17,50		
3.1.06.15		PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Rp.	383.008.000	274.971.000	0	0	0	0		

		TUJUAN / SASARAN/PROGRA M /KEGIATAN / Output Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Pada Tahun Awal	Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021
					Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target
			persentase vol sampah terangkut dari TPS ke TPA	m3	1.043.152	1.304.039	0	0	0	0
3.1.06.15	00 1	PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Rp.	127.560.000	116.212.000	0	0	0	0
			persentase volume sampah yang terangkut	m3	73.000	73.000	0	0	0	0
3.1.06.15	00 2	PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN		Rp.	255.448.000	158.759.000	0	0	0	0

		TUJUAN / SASARAN/PROGRA M /KEGIATAN / Output Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Pada Tahun Awal	Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021
						Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target
			Jumlah Kegiatan Kebersihan Meliputi Bilas Sampah, Bongkaran Bangunan, Tebangan Pohon dll yang dilakukan di Jl.Protokol dan sekitarnya	kegiatan	300	300	0	0	0	0
3.1.06.16		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Rp.	93.024.000	61.021.000	57.048.000	57.618.000	58.194.000	58.776.000
			Persentase jumlah titik pantau Adipura yang tertangani	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		TUJUAN / SASARAN/PROGRA M /KEGIATAN / Output Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Pada Tahun Awal	Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021
					Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target
3.1.06.16	00 1	KOORDINASI PENILAIAN KOTA SEHAT / ADIPURA		Rp.	93.024.000	61.021.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
			Jumlah Kegiatan Kebersihan Meliputi Bilas Sampah, Bongkaran Bangunan, Tebangan Pohon di Jalan protokol dan lingkungansekitarny a	kegiatan	300	300	300	300	300	300
3.1.06.16	00 3	PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN		Rp.	0	0	27.048.000	27.618.000	28.194.000	28.776.000

		TUJUAN / SASARAN/PROGRA M /KEGIATAN / Output Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Pada Tahun Awal	Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021
					Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target
			Jumlah Kegiatan Kebersihan Meliputi Bilas Sampah, Bongkaran Bangunan, Tebangan Pohon di Jl.protokol dan sekitarnya	kegiatan	0	0	300	300	300	300
3.1.06.17		PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA		Rp.	0	49.600.000	60.000.000	0	0	0
			persentase sarpras olahraga di kecamatan	%	0,00	62,00	63,00	0,00	0,00	0,00
3.1.06.17	001	PEMBINAAN OLAH RAGA YANG BERKEMBANG DI MASYARAKAT		Rp.	0	49.600.000	60.000.000	0	0	0

		TUJUAN / SASARAN/PROGRA M /KEGIATAN / Output Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Pada Tahun Awal	Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021
					Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target
			Fasilitasi kegiatan Olah Raga masyarakat	kegiatan	0	2	2	0	0	0
3.1.06.18		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN		Rp.	0	20.000.000	194.157.000	196.099.000	198.060.000	200.040.000
			Persentase jumlah Siskamling di lingkungan RT	%	76,00	79,00	82,00	85,00	88,00	90,00
3.1.06.18	00 1	PENINGKATAN KEWASPADAAN MASYARAKAT TERHADAP GANGGUAN TRANTIBMAS DAN TERJADINYA BENCANA		Rp.	0	20.000.000	194.157.000	196.099.000	198.060.000	200.040.000

		TUJUAN / SASARAN/PROGRA M /KEGIATAN / Output Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Pada Tahun Awal	Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021	
					Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	
			Presentase penurunan jumlah pelanggaran peraturan dan gangguan trantibum di Kelurahan se Kecamatan	%	0,00	21,00	22,00	23,00	24,00	25,00
3.1.06.20		PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN		Rp.	2.559.766.00 0	552.656.000	981.878.000	991.697.000	1.001.614.000	1.011.630.000
			Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan	kegiatan	11.505	13.629	14.992	932	1.025	1.127

		TUJUAN / SASARAN/PROGRA M /KEGIATAN / Output Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Pada Tahun Awal	Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021
					Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target
			Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat)	keluraha n	0	26	63	6	8	10
3.1.06.20	00 1	PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT PERDESAAN		Rp.	2.159.766.00 0	452.003.000	336.878.000	494.500.000	494.500.000	494.500.000
			Jumlah Kegiatan lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LPMK dan PKK)	kegiatan	220	220	220	220	220	220
3.1.06.20	00 3	FASILITASI KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN		Rp.	400.000.000	100.653.000	645.000.000	497.197.000	507.114.000	517.130.000

		TUJUAN / SASARAN/PROGRA M /KEGIATAN / Output Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Pada Tahun Awal	Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021
						Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target
			Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan	kelurahan	0	2	2	2	2	2
			Kampung Tematik	Kel	0	0	0	0	0	0
3.1.06.21		PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN KELURAHAN		Rp.	8.774.897.00 0	10.300.160.00 0	10.182.118.00 0	10.194.291.00 0	10.345.679.00 0	10.477.751.00 0
			Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang	%	96,06	97,70	98,30	98,87	99,04	99,50
			Persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan dalam musrenbang	%	87,68	90,26	91,44	92,63	93,81	95,00

		TUJUAN / SASARAN/PROGRA M /KEGIATAN / Output Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Pada Tahun Awal	Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021
					Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target
			persentasi kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui musrenbang	%	42,61	50,00	51,00	52,00	53,00	55,00
3.1.06.21	002	PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA		Rp.	65.000.000	85.000.000	95.000.000	95.000.000	95.000.000	95.000.000
			Daftar Skala Prioritas Pembangunan Tingkat RW, Kelurahan dan Kecamatan	dokumen	82	82	82	82	82	82
3.1.06.21	003	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN		Rp.	88.466.000	25.000.000	95.000.000	95.000.000	95.000.000	95.000.000

		TUJUAN / SASARAN/PROGRA M /KEGIATAN / Output Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Pada Tahun Awal	Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021
					Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target
			Laporan Hasil Monev, dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Hasil Musrenbang	dokumen	2	2	2	2	2	2
3.1.06.21	004	FASILITASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN HASIL MUSRENBANG		Rp.	1.381.500.000	1.459.000.000	1.528.065.000	1.528.065.000	1.528.065.000	1.528.065.000
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan	kegiatan	10	10	10	10	10	10

		TUJUAN / SASARAN/PROGRA M /KEGIATAN / Output Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Pada Tahun Awal	Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021
					Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target
3.1.06.21	00 5	Penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana umum		Rp.	416.317.000	300.675.000	0	0	0	0
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Hasil Musrenbang yang dilakukan jasa konsultasi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan	dokumen	8	6	0	0	0	0
3.1.06.21	00 6	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN		Rp.	3.090.016.000	2.161.575.000	3.440.188.750	2.161.575.000	2.161.575.000	2.161.575.000

		TUJUAN / SASARAN/PROGRA M /KEGIATAN / Output Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Pada Tahun Awal	Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021
					Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kecamatan dan Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	kegiatan	70	47	68	68	68	68
3.1.06.21	00 7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERMASYARAKAT		Rp.	1.234.698.00 0	3.585.560.000	0	0	0	0
			Sarana dan Prasarana Lingkungan Masyarakat yang terpelihara	kegiatan	14	58	0	0	0	0

		TUJUAN / SASARAN/PROGRA M /KEGIATAN / Output Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Pada Tahun Awal	Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021
					Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target
3.1.06.21	00 8	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan kualitas saluran lingkungan		Rp.	2.498.900.00 0	2.170.575.000	3.728.864.250	5.019.651.000	5.171.039.000	5.303.111.000
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Saluran Lingkungan di Kecamatan dan Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	kegiatan	74	52	58	58	58	58
3.1.06.21	00 9	Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan hasil Musrenbang		Rp.	0	512.775.000	1.295.000.000	1.295.000.000	1.295.000.000	1.295.000.000

		TUJUAN / SASARAN/PROGRA M /KEGIATAN / Output Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Pada Tahun Awal	Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021
					Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target
			Jumlah Kegiatan Pembangunan non Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan	kegiatan	0	40	80	80	80	80
3.1.06.23		PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT		Rp.	0	281.291.000	292.692.000	295.619.000	298.575.000	301.561.000
			Persentase Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	%	80,00	88,00	140,00	8,00	165,00	177,00

		TUJUAN / SASARAN/PROGRA M /KEGIATAN / Output Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Pada Tahun Awal	Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021
					Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target
			Kelurahan yang melaksanakan program Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat (LHBS) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	kel	120	130	140	8	10	10
3.1.06.23	001	FASILITASI FORUM KECAMATAN DAN KELURAHAN SEHAT		Rp.	0	281.291.000	292.692.000	295.619.000	298.575.000	301.561.000
			Kelurahan yang melaksanakan program Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat (LHBS) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Kelurahan	0	10	100	100	10	10

		TUJUAN / SASARAN/PROGRA M /KEGIATAN / Output Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Pada Tahun Awal	Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021
					Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target
Tujuan 2. Meningkatnya birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang bersih, melayani			Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM	78.00	79.00	81.00	83.00	85.00	87.00
Sasaran 1. Meningkatnya manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan			Persentase capaian kinerja Kecamatan dan Kelurahan	%	98,00	98,00	98,00	99,00	99,00	99,00
			Cakupan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
00.0.00.0 1		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Rp.	396.216.050	4.158.779.000	4.121.278.000	4.162.490.000	4.204.116.000	4.246.157.000

		TUJUAN / SASARAN/PROGRA M /KEGIATAN / Output Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Pada Tahun Awal	Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021
					Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target
			Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
00.0.00.0 1	00 2	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK		Rp.	196.081.050	190.320.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000
			Jumlah alat tulis kantor yang disediakan pada tahun berkenaan	jenis	10	10	0	0	0	0
			Langganan rekening telepon air listrik dan koran	bulan	0	0	12	12	12	12
00.0.00.0 1	01 0	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR		Rp.	46.750.000	55.340.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000

		TUJUAN / SASARAN/PROGRA M /KEGIATAN / Output Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Pada Tahun Awal	Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021
					Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target
			Jumlah alat tulis kantor yang disediakan pada tahun berkenaan	jenis	15	15	15	15	15	15
00.0.00.0 1	01 1	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGKANDAN		Rp.	59.985.000	67.370.000	24.170.000	24.170.000	24.170.000	24.170.000
			Jumlah barang cetakan yang disediakan pada tahun berkenaan	cetakan	120	120	20	20	20	20
			Jumlah pengkandaaan yang disediakan pada tahun berkenaan	lembar	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600

		TUJUAN / SASARAN/PROGRA M /KEGIATAN / Output Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Pada Tahun Awal	Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021
					Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target
00.0.00.0 1	01 2	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR		Rp.	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
			Jumlah komponen listrik yang disediakan pada tahun berkenaan	jenis	0	6	6	6	6	6
00.0.00.0 1	01 7	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN		Rp.	74.400.000	83.400.000	47.400.000	47.400.000	47.400.000	47.400.000
			Jumlah kegiatan rapat	kegiatan	36	132	36	36	36	36
00.0.00.0 1	01 8	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH		Rp.	19.000.000	3.633.099.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000

		TUJUAN / SASARAN/PROGRA M /KEGIATAN / Output Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Pada Tahun Awal	Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021
					Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target
			Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	kegiatan	300	300	10	10	10	10
00.0.00.01	028	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH		Rp.	0	0	3.388.148.000	3.429.360.000	3.470.986.000	3.513.027.000
			Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	kegiatan	0	0	300	300	300	300
00.0.00.01	154	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran		Rp.	0	119.250.000	135.560.000	135.560.000	135.560.000	135.560.000
			Jumlah kegiatan penunjang capaian kinerja	kegiatan	0	3	10	10	10	10

		TUJUAN / SASARAN/PROGRA M /KEGIATAN / Output Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Pada Tahun Awal	Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021
					Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target
00.0.00.0 1	15 7	Penyediaan Operasional Kelurahan		Rp.	0	0	408.000.000	0	0	0
			Jumlah operasional kantor kelurahan yang terpenuhi pada tahun berkenaan	Jenis	0	0	9	0	0	0
00.0.00.0 1	22 6	Operasional Kelurahan Randusari		Rp.	0	0	0	40.800.000	40.800.000	40.800.000
			Operasional Kelurahan Randusari	bulan	0	0	0	12,00	12,00	12,00
00.0.00.0 1	22 7	Operasional Kelurahan Bulustalan		Rp.	0	0	0	40.800.000	40.800.000	40.800.000

		TUJUAN / SASARAN/PROGRA M /KEGIATAN / Output Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Pada Tahun Awal	Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021
					Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target
			Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	%	0	0	0	100,00	100,00	100,00
00.0.00.0 1	22 8	Operasional Kelurahan Barusari		Rp.	0	0	0	40.800.000	40.800.000	40.800.000
			Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	%	0	0	0	100,00	100,00	100,00
00.0.00.0 1	22 9	Operasional Kelurahan Mugassari		Rp.	0	0	0	40.800.000	40.800.000	40.800.000
			Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	%	0	0	0	100,00	100,00	100,00
00.0.00.0 1	23 0	Operasional Kelurahan Pleburan		Rp.	0	0	0	40.800.000	40.800.000	40.800.000

		TUJUAN / SASARAN/PROGRA M /KEGIATAN / Output Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Pada Tahun Awal	Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021
					Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target
			Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	%	0	0	0	100,00	100,00	100,00
00.0.00.0 1	23 1	Operasional Kelurahan Wonodri		Rp.	0	0	0	40.800.000	40.800.000	40.800.000
			Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	%	0	0	0	100,00	100,00	100,00
00.0.00.0 1	23 2	Operasional Kelurahan Peterongan		Rp.	0	0	0	40.800.000	40.800.000	40.800.000
			Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	%	0	0	0	100,00	100,00	100,00

		TUJUAN / SASARAN/PROGRA M /KEGIATAN / Output Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Pada Tahun Awal	Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021
					Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target
00.0.00.0 1	23 3	Operasional Kelurahan Lamper Lor		Rp.	0	0	0	40.800.000	40.800.000	40.800.000
			Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	%	0	0	0	100,00	100,00	100,00
00.0.00.0 1	23 4	Operasional Kelurahan Lamper Kidul		Rp.	0	0	0	40.800.000	40.800.000	40.800.000
			Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	%	0	0	0	100,00	100,00	100,00
00.0.00.0 1	23 5	Operasional Kelurahan Lamper Tengah		Rp.	0	0	0	40.800.000	40.800.000	40.800.000

		TUJUAN / SASARAN/PROGRA M /KEGIATAN / Output Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Pada Tahun Awal	Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021
					Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target
00.0.00.0 2		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Rp.	801.758.775	858.131.000	950.033.000	959.533.000	969.128.000	978.817.000

		TUJUAN / SASARAN/PROGRA M /KEGIATAN / Output Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Pada Tahun Awal	Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021
					Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target
			Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		TUJUAN / SASARAN/PROGRA M /KEGIATAN / Output Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Pada Tahun Awal	Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021
					Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target
00.0.00.0 2	00 5	PENGADAAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL		Rp.	0	205.000.000	0	0	0	0
			Fasilitas kendaraan dinas operasional yang mendukung kerja pegawai	unit	0	1	0	0	0	0
00.0.00.0 2	00 7	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR		Rp.	50.012.000	81.058.000	114.193.000	20.000.000	10.000.000	10.000.000

		TUJUAN / SASARAN/PROGRA M /KEGIATAN / Output Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Pada Tahun Awal	Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021
					Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target
			Fasilitas perlengkapan kantor yang mendukung kerja pegawai	jenis	2	8	8	8	8	8
00.0.00.0 2	00 9	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR		Rp.	25.812.000	235.971.000	12.750.000	12.750.000	12.750.000	12.750.000
			Fasilitas peralatan kantor yang mendukung kerja pegawai	jenis	1	4	4	4	4	4
00.0.00.0 2	02 1	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS		Rp.	2.400.000	8.000.000	6.390.000	6.390.000	6.390.000	6.390.000
			Fungsi rumah dinas Camat yang terpelihara untuk menunjang kinerja	unit	1	1	1	1	1	1

		TUJUAN / SASARAN/PROGRA M /KEGIATAN / Output Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Pada Tahun Awal	Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021
					Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target
00.0.00.0 2	02 2	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR		Rp.	176.400.000	176.400.000	118.600.000	318.600.000	318.600.000	318.600.000
			Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor	unit	11	11	11	11	11	11
00.0.00.0 2	02 4	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL		Rp.	100.368.000	111.960.000	147.350.000	147.350.000	147.350.000	147.350.000
			Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenaan	unit	40	40	40	40	40	40
00.0.00.0 2	02 6	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR		Rp.	3.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000

		TUJUAN / SASARAN/PROGRA M /KEGIATAN / Output Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Pada Tahun Awal	Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021
					Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target
			Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara pada tahun berkenaan	jenis	6	0	6	6	6	6
00.0.00.0 2	02 8	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR		Rp.	29.600.000	29.600.000	28.750.000	28.750.000	28.750.000	28.750.000
			Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara pada Tahun Berkenaan	jenis	7	7	7	7	7	7
00.0.00.0 2	04 2	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR		Rp.	408.766.775	0	500.000.000	403.693.000	423.288.000	432.977.000

		TUJUAN / SASARAN/PROGRA M /KEGIATAN / Output Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Pada Tahun Awal	Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021
					Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target
			Jumlah Perbaikan Sedang/Berat Gedung Kantor	unit	11	0	11	11	11	11
00.0.00.0 2	08 3	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIJINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL		Rp.	5.400.000	10.142.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
			Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	unit	40	40	40	40	40	40
00.0.00.0 6		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Rp.	116.777.000	142.760.000	151.378.000	152.892.000	154.420.000	155.965.000

		TUJUAN / SASARAN/PROGRA M /KEGIATAN / Output Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Pada Tahun Awal	Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021
					Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target
			Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
00.0.00.0 6	00 5	PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA DAN PEMBANTU		Rp.	73.402.000	97.010.000	145.378.000	146.892.000	148.420.000	139.965.000
			Target kinerja PA, KPA, PPK, Bendahara dan Bendahara Pembantu yang Terpenuhi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
00.0.00.0 6	00 6	PENYUSUNAN LKPJ SKPD		Rp.	6.900.000	4.850.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
			Tersusunnya LKPJ Perangkat Daerah	dokumen	1	1	1	1	1	1

		TUJUAN / SASARAN/PROGRA M /KEGIATAN / Output Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Pada Tahun Awal	Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021
					Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target
00.0.00.0 6	01 0	PENYUSUNAN LAKIP		Rp.	6.900.000	7.800.000	1.000.000	0	0	0
			Jumlah LAKjIP Perangkat Daerah	dokumen	1	1	1	0	0	0
00.0.00.0 6	01 4	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD		Rp.	0	7.800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
			LPPD,EKK Kecamatan dan Evkin Kelurahan	dokumen	0	3	3	3	3	3
00.0.00.0 6	01 8	PENYUSUNAN LKJIP		Rp.	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
			Jumlah LKjIP Perangkat Daerah	dokumen	0	0	0	1	1	1

		TUJUAN / SASARAN/PROGRA M /KEGIATAN / Output Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Pada Tahun Awal	Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021
					Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target
00.0.00.0 6	02 0	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN		Rp.	3.600.000	7.800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	dokumen	1	1	1	1	1	1
00.0.00.0 6	02 8	PENYUSUNAN RENJA SKPD		Rp.	9.075.000	4.850.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
			Jumlah Renja dan Renja Perubahan Perangkat Daerah	dokumen	1	1	2	2	2	2
00.0.00.0 6	02 9	PENYUSUNAN RENSTRA SKPD		Rp.	10.000.000	7.800.000	0	0	0	10.000.000
			Renstra Perangkat Daerah	dokumen	1	1	0	0	0	1

		TUJUAN / SASARAN/PROGRA M /KEGIATAN / Output Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Pada Tahun Awal	Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021
					Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target
00.0.00.0 6	03 4	PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD		Rp.	6.900.000	4.850.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
			Jumlah RKA dan DPA Perubahan Perangkat Daerah	dokumen	2	2	2	2	2	2
3.1.06.19		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Rp.	60.560.500	15.677.000	0	0	0	0
			Jumlah Aset Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	JML BIDANG	202	285	0	18	0	0

		TUJUAN / SASARAN/PROGRA M /KEGIATAN / Output Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Pada Tahun Awal	Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021
					Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target
3.1.06.19	00 3	OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PBB OLEH PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN KELURAHAN		Rp.	60.560.500	15.677.000	0	0	0	0
			Peningkatan pembayaran PBB di Kecamatan dan 10 kelurahan	%	92,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.06.22		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM		Rp.	0	260.361.000	294.530.000	309.257.000	265.888.000	268.547.000

		TUJUAN / SASARAN/PROGRA M /KEGIATAN / Output Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Pada Tahun Awal	Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021
					Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target
			Presetase Ketersediaan Sarana Prasarana Layanan yang Berstandar PATEN	%	0,00	24,00	45,00	57,00	77,00	100,00
			Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan	keluraha n	209.966	279.255	398.018	23.902	25.416	26.981
3.1.06.22	00 1	MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN		Rp.	0	24.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000

		TUJUAN / SASARAN/PROGRA M /KEGIATAN / Output Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Pada Tahun Awal	Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021
					Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target
			Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	kegiatan	4	4	4	4	4	4
3.1.06.22	002	PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA DAN PEMBINAAN MENTAL ROHANI APARATUR		Rp.	0	0	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000
			Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan Untuk Peningkatan Kapasitas dan Etos Kerja	kegiatan	0	0	0	5	5	5

		TUJUAN / SASARAN/PROGRA M /KEGIATAN / Output Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Pada Tahun Awal	Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021
					Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target
3.1.06.22	00 3	IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)		Rp.	0	136.361.000	254.530.000	169.257.000	125.888.000	128.547.000
			Jumlah Pelayanan Administrasi di Kantor Kecamatan dan Kelurahan	pelayana n	0	5.500	6.000	6.500	7.000	7.000
3.1.06.22	00 4	PEMBANGUNAN PUSAT PEMBELAJARAN (BLC)		Rp.	0	100.000.000	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000
			Jumlah Sarana Prasarana Komunikasi dan Informasi Masyarakat	jenis	0	15	0	1	2	2

		TUJUAN / SASARAN/PROGRA M /KEGIATAN / Output Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Pada Tahun Awal	Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021
					Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target
3.1.06.24		PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH		Rp.	53.662.000	101.594.000	0	0	0	0
			Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan KDH di Kecamatan	%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.06.24	00 1	Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tata pemerintahan kecamatan		Rp.	53.662.000	101.594.000	0	0	0	0

		TUJUAN / SASARAN/PROGRA M /KEGIATAN / Output Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Pada Tahun Awal	Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021
					Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target
			Jumlah pembinaan, monitoring dan evaluasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	kegiatan	12	12	0	0	0	0
3.1.06.25		PROGRAM PENGELOLAAN ASSET PEMERINTAH		Rp.	0	0	33.477.000	33.812.000	329.233.000	332.525.000
			Jumlah Aset Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	jml aset	0	0	312	18	18	18
3.1.06.25	00 4	MONITORING PENGENDALIAN ASET KECAMATAN		Rp.	0	0	33.477.000	33.812.000	329.233.000	332.525.000

		TUJUAN / SASARAN/PROGRA M /KEGIATAN / Output Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Pada Tahun Awal	Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021
					Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target
			Jumlah asset yang dikelola di kecamatan dan kelurahan	bidang	0	0	0	15	15	15
3.1.06.26		PROGRAM PENINGKATAN INTENSIFIKASI PAD		Rp.	0	0	21.739.000	21.957.000	22.176.000	22.398.000
			Prosentase jumlah WP yang membayar PBB di Kecamatan dan Kelurahan	%	17,88	84,81	91,50	93,06	94,31	95,00
			Persentase Jumlah penerimaan pembayaran PBB Kelurahan se Kecamatan tahun berkenaan	%	18,00	85,00	92,00	93,00	95,00	95,00

		TUJUAN / SASARAN/PROGRA M /KEGIATAN / Output Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Pada Tahun Awal	Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021
					Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target	Rp / Target
3.1.06.26	00 3	OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PBB OLEH PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN KELURAHAN		Rp.	0	0	21.739.000	21.957.000	22.176.000	22.398.000
			Prosentase jumlah WP yang membayar PBB di Kecamatan dan Kelurahan	%	0,00	0,00	82,00	84,00	85,00	90,00

Sedangkan untuk tujuan OPD, sasaran strategis OPD, outcome dan outpt dapat dilihat pada Cascading Kecamatan Semarang Selatan berikut :

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menyajikan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah kota sesuai dengan kewenangan perangkat daerah kecamatan yaitu urusan kewilayahan. Tabel Indikator Kinerja Utama Kecamatan disajikan pada berikut :

tabel 7.1

Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	(1)	(2)	(3)
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	11,82 %
2.	Meningkatnya manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Persentase capaian kinerja Kecamatan dan Kelurahan	98%
		Cakupan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	100%

sedangkan tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sesuai dengan kewenangan kecamatan dapat dilihat pada tabel 7.2.

(T-C. 28) TABEL 7.2

KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN KEWILAYAHAN KECAMATAN YANG MENDUKUNG KINERJA DAERAH

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
1.	Persentase kehadiran RT dalam musrenbang	%	87	87,68	90,26	91,44	92,63	93,81	95,00	99,00
2.	Persentase RT yang mengusulkan pembangunan dalam musrenbang	%	95	96,06	97,70	98,30	98,87	99,04	99,50	99,50
3.	Persentase kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui musrenbang	%	40	42,61	50,00	51,00	52,00	53,00	55,00	55,00

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 disusun untuk menjadi pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi Perangkat Daerah Kecamatan Semarang Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tuntutan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang mana petunjuk pelaksanaan dan teknisnya tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017.

Perubahan Renstra ini merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Semarang Selatan

Selanjutnya Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Semarang Selatan Tahun 2016-2021 akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja), sedangkan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Dengan adanya Perubahan Renstra ini, diharapkan semua pelaksanaan tugas di Kecamatan Semarang Selatan dapat lebih terarah dan terfokus serta dapat terukur sehingga tingkat keberhasilannya akan sangat mendukung dalam pencapaian kinerja Kecamatan Semarang Selatan yang selanjutnya mampu mendukung penyelenggaraan pemerintah kecamatan yang baik.

Partisipasi dan komitmen seluruh jajaran sangat diperlukan dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah dicanangkan. Diharapkan seluruh aparatur melaksanakan program dan kegiatan yang ada dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Perlu disampaikan bahwa meskipun Renstra ini telah diupayakan memuat seluruh aspek yang ada dan diharapkan dapat memberikan jawaban sekaligus solusi bagi permasalahan yang selama ini masih belum teratasi, namun dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan yang terjadi. Oleh sebab itu, pelaksanaan renstra ini membutuhkan kecermatan, kreativitas dan respon yang cepat terhadap perubahan yang terjadi. Dengan demikian, dokumen perencanaan ini memiliki kelenturan (fleksibilitas) dalam pelaksanaannya,

bersifat dinamis sehingga memungkinkan terjadi koreksi apabila terjadi perkembangan yang belum dimuat dalam dokumen ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-NYA kepada kita dalam setiap langkah dan pelaksanaan tugas.

Semarang, Desember 2017

CAMAT SEMARANG SELATAN

ttd

ARI DJOKO SANTOSO, SH. MM

NIP.19620617 199203 1 008